

**DETERMINAN AUSTRALIA DALAM MEMPERTAHANKAN AUKUS DI TENGAH
KETERGANTUNGAN EKONOMI TERHADAP TIONGKOK**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD RAHMAN ASHIDIEQ

22323178

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**DETERMINAN AUSTRALIA DALAM MEMPERTAHANKAN AUKUS DI TENGAH
KETERGANTUNGAN EKONOMI TERHADAP TIONGKOK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

MUHAMMAD RAHMAN ASHIDIEQ

22323178

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

DETERMINAN AUSTRALIA DALAM MEMPERTAHANKAN AUKUS DI TENGAH
KETERGANTUNGAN EKONOMI TERHADAP TIONGKOK

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 Februari 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karna Utami Dewi, S.I.P., M.A

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
2. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S., Ph.D.
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Three handwritten signatures are shown, each on a horizontal line. The first signature is 'Hangga Fathana', the second is 'Irawan Jati', and the third is 'Hasbi Aswar'.

Surat Pernyataan Integritas Akademik

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahman Ashidieq

Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02 Juli 2002

Alamat : Jl Kaliurang Km.5, Karangwuni, Depok, Sleman, Yogyakarta.

NIM : 22323178

Program Studi : Hubungan Internasional (Reguler)

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh karya akademik yang saya hasilkan selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Hubungan Internasional adalah karya saya sendiri yang dikerjakan secara jujur dan independen dengan:

1. Tidak menggunakan jasa pihak ketiga (joki) dalam pengerjaan karya akademik atau menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan karya akademik mahasiswa lain. Semua kontribusi yang telah diberikan oleh pihak lain dalam penulisan karya akademik saya telah sesuai dengan aturan dan tercantum dengan benar.
2. Tidak melakukan plagiasi yang berupa pengakuan atas hasil karya akademik orang lain. Segala gagasan atau data yang didapatkan dari karya atau pemikiran orang lain telah melalui proses parafrase dan dicantumkan pada sitasi.
3. Tidak melakukan manipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau perangkat lunak otomatis lainnya untuk pengerjaan hal substansial dalam penulisan karya akademik.

Apabila di masa mendatang setelah kelulusan saya, ditemukan informasi yang membuktikan bahwa salah satu atau sebagian karya akademik saya tidak merupakan hasil kerja saya sendiri dan/atau merupakan pelanggaran atas pernyataan saya di atas, saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai dengan regulasi yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 Februari 2026



Muhammad Rahman Ashidieq

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Latar Belakang	10
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Cakupan penelitian	16
1.5 Tinjauan Pustaka	16
1.6 Kerangka Pemikiran	19
1.7 Argumen Sementara	22
1.8 Metode Penelitian	22
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	22
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	23
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	23
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	23
1.9 Sistematika Pembahasan	23
BAB II TRAJEKTORI ALIANSI AUSTRALIA-AMERIKA SERIKAT	25
2.1 Sejarah Australia-Amerika Serikat melalui ANZUS	25
2.2 AUKUS	30
2.3 Loyalitas Australia terhadap Amerika Serikat	36
BAB III DETERMINAN AUSTRALIA DALAM AUKUS	42
3.1 Insentif Sistemik	42
3.2 Faktor Internal sebagai Filter Domestik Australia	47
3.3 AUKUS Sebagai Respons Kebijakan	54
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Logika Kausal Realisme Neoklasik	21
Diagram 4. Determinan Australia dalam Mempertahankan AUKUS	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Variabel Logika Kausal Realisme Neoklasik	19
Tabel 2. Respons Negara-Negara di Kawasan terhadap AUKUS	32

DAFTAR SINGKATAN

ANZUS	: Australia, New Zealand, dan United States
AUKUS	: Australia, United Kingdom, dan United States
BRI	: Belt and Road Initiative
ChAFTA	: China-Australia Free Trade Agreement
EEC	: European Economic Community
Quad	: Quadrilateral Security Dialogue

ABSTRAK

Pada tahun 2025, Australia mempertahankan kerja sama keamanan bersama Inggris dan Amerika Serikat yang dikenal dengan AUKUS. Keputusan ini menimbulkan polemik kebijakan luar negeri Australia karena memiliki ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok sebagai rival Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menentukan bagi keputusan Australia dalam mempertahankan AUKUS dengan menggunakan teori realisme neoklasik. Fenomena kebangkitan Tiongkok menggeser perimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, melemahkan pengaruh Amerika Serikat, serta menciptakan tekanan eksternal bagi Australia. Selain itu, Australia mengalami dilema keamanan dari ketidakpastian sistem internasional, yakni motif Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap keamanan Australia. Maka dari itu, Australia membutuhkan kepastian keamanan dari ancaman yang dihadapi oleh tekanan eksternal di kawasan. Tekanan eksternal tersebut kemudian diinterpretasikan oleh elit Australia mulai dari persepsi ancaman modernisasi militer Tiongkok hingga hubungan aliansi Australia-Amerika Serikat. Persepsi elit Australia dipengaruhi oleh budaya strategis *'crusaders'* dan *'pragmatists'* dalam melihat aliansi, ideologi, dan kapasitas negara dalam legitimasi AUKUS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa AUKUS digunakan sebagai respons kebijakan dalam mengimbangi tekanan eksternal dari kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik. Penelitian ini menemukan bahwa AUKUS tidak memisahkan kepentingan ekonomi, dimana Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama Australia hingga saat ini.

Kata-kata kunci: AUKUS; Australia; Realisme Neoklasik; Tiongkok; Indo-Pasifik.

ABSTRACT

In 2025, Australia maintained its security partnership with the United Kingdom and the United States known as AUKUS. This decision generated debate, given Australia's economic dependence on China as a strategic rival of the United States. This study examines the factors shaping Australia's decision to sustain AUKUS through the lens of neoclassical realism. China's rise has shifted the balance of power in the Indo-Pacific, reduced U.S. influence, and created external pressures on Australia. At the same time, uncertainty over the intentions of both China and the United States has intensified Australia's security dilemma. In response, Australia seeks greater strategic assurance amid regional instability. These external pressures are filtered through elite perceptions, particularly regarding China's military modernization and the importance of the Australia-United States alliance. Such perceptions are shaped by competing strategic cultures "crusaders" and "pragmatists", which influence how alliances, ideology, and state capacity are understood in legitimizing AUKUS. The findings show that AUKUS represents a balancing policy response to external pressures from China's rise, while not severing economic ties, as China remains Australia's largest trading partner.

Keywords: AUKUS; Australia; Neoclassical Realism; China; Indo-Pacific

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah ‘Indo-Pasifik’ sebagai geopolitik pertama kali dipopulerkan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007 di depan parlemen India. Shinzo Abe menekankan ‘Indo-Pasifik’ sebagai upaya konektivitas antar negara untuk kestabilan kawasan melalui kerja sama dalam menjaga keamanan maritim (Kitaoka 2019; Chansoria 2023). Selain itu, Indo-Pasifik juga digambarkan sebagai respons dari kebangkitan kekuatan besar seperti Tiongkok, serta rivalitasnya dengan Amerika Serikat. Secara geografis, Australia menempati posisi strategis di kawasan, menghubungkan antara Asia dan Pasifik, serta antara Samudra Hindia dan Pasifik (Vuving 2021, 34). Posisi Australia yang strategis memberikan ruang untuk berhubungan dengan dua negara dengan kekuatan besar, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Sehingga, saat ini, Australia telah menjalin hubungan ekonomi dengan Tiongkok, serta memiliki hubungan beraliansi militer dengan Amerika Serikat di saat bersamaan (Trisni 2025).

Melihat relasinya dengan Tiongkok, Australia memiliki hubungan ketergantungan secara ekonomi, dimana Tiongkok merupakan mitra dagang utama Australia (Australian Government 2026). Ketergantungan ekonomi Australia terhadap Tiongkok dapat ditinjau dari pertumbuhan hubungan ekonomi sebesar 12% semenjak kerja sama ekonomi kedua negara dimulai. Tercatat, Australia dan Tiongkok mendapatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1977-1984 awalnya

berjumlah US\$ 500 juta menjadi US\$ 1,2 miliar (Grant 2022). Hubungan ekonomi Australia-Tiongkok turut diperkuat melalui penandatanganan perjanjian perdagangan bebas China-Australia Free Trade Agreement (ChAFTA) pada tahun 2015. Perjanjian ini meningkatkan nilai ekspor Australia tumbuh sebesar 42,11% dengan diarahkan ke Tiongkok sehingga menguntungkan secara ekonomi (Australian Bureau of Statistics 2020). Hingga saat ini, Tiongkok masih tetap menjadi mitra dagang utama bagi Australia, hal ini menunjukkan relasi ketergantungan Australia secara ekonomi (Australian Government 2026).

Namun, kebangkitan Tiongkok sebagai negara kekuatan besar menciptakan dinamika politik bagi negara-negara di kawasan, terutama melalui kekuatan ekonomi dan militernya. Fenomena kebangkitan Tiongkok dapat dilihat semenjak reformasi ekonomi yang menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan pusat investasi global (Dirgantoro et al. 2024). Melalui program Belt and Road Initiative (BRI), Tiongkok menjadi daya tarik bagi negara-negara di kawasan dalam sektor ekonomi dan pembangunan. Daya tarik melalui program BRI tersebut dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik (Yu 2024, 5–6; Anam and Ristiyani 2018). Selain berfokus terhadap kepentingan ekonomi, Tiongkok turut membangun kekuatan maritim melalui upaya modernisasi militer untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan keamanan (Huang 2016; Pedrason 2021). Pengadaan teknologi militer seperti rudal hipersonik, kapal perusak modern, dan pengadaan pangkalan militer merupakan upaya peningkatan keamanan Tiongkok di kawasan (Fravel 2015; Saeed 2017). Fenomena kebangkitan Tiongkok, terutama

modernisasi militernya, menciptakan suatu disrupsi bagi stabilitas keamanan bagi negara-negara di kawasan, salah satunya bagi Australia (Medcalf 2023).

Posisi ekonomi dan militer strategis Tiongkok, tumbuh menjadi ancaman baru untuk beberapa negara di kawasan, terutama Amerika Serikat dan Australia. Dominasi ekonomi dan militer memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk menjadi negara hegemoni, sehingga Tiongkok dianggap merusak stabilitas keamanan di kawasan (Harahap 2020). Konflik Laut Cina Selatan menjadi contoh nyata bahwa Tiongkok merupakan wujud ancaman bagi Amerika Serikat dalam mempertahankan posisinya di Indo-Pasifik (Djuyandi et al. 2021). Dalam mempertahankan statusnya sebagai negara adidaya, Amerika Serikat merespons ancaman Tiongkok dengan meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Amerika Serikat bekerja sama baik secara militer dan ekonomi dengan beberapa negara yang ikut terancam akan hadirnya modernisasi militer Tiongkok (Amin and Rafique 2021). Australia melihat kebangkitan Tiongkok sebagai suatu tantangan terhadap keamanan lingkungan negara di Indo-Pasifik, terutama mengenai peningkatan kekuatan maritimnya. Dalam Pembaruan Strategis Pertahanan 2020, Australia melihat Tiongkok semakin asertif, sehingga menjadi tantangan bagi stabilitas keamanan kawasan dan Australia (Australian Government 2020).

Ancaman keamanan dari keberadaan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menjadikan negara-negara di kawasan khawatir akan kestabilan politik dan keamanan di kawasan. Pada 15 September 2021, Australia, Amerika Serikat, dan Inggris melalui pemimpinnya mengumumkan aliansi kerja sama pertahanan bernama AUKUS

(Morrison, Scott et al. 2023). Kerja sama atau aliansi AUKUS berfokus untuk menciptakan keamanan kolektif terutama keamanan maritim bagi ketiga negara yang terlibat. Fokus dari perjanjian AUKUS yakni sebagai suatu usaha pencegahan (*deterrence*) dari potensi ancaman modernisasi militer Tiongkok (Buana et al. 2023). Isi perjanjian AUKUS sendiri mencakup mengenai pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk angkatan laut Australia sebagai penguatan kapabilitas pertahanan. Selain itu, terdapat kerja sama keamanan siber, kerja sama dalam sektor kecerdasan buatan, dan kerja sama dalam teknologi kuantum (Nindya and Abiyya 2022). Eksistensi AUKUS memperlihatkan keseriusan Australia, Amerika Serikat, dan Inggris dalam melihat potensi ancaman kebangkitan Tiongkok di kawasan (Shoebridge 2021).

Kehadiran AUKUS ternyata mendapatkan respons kurang positif bagi beberapa pihak seperti yang dialami oleh Prancis. Sebelum terbentuknya AUKUS, Australia telah menjalin kerja sama dengan Prancis melalui perjanjian pembangunan kapal selam nuklir dalam program “Attack-class submarine”. Namun, Australia justru membuat keputusan untuk memutus kontrak secara sepihak dari perjanjian ini setelah penandatanganan AUKUS. Prancis menganggap jika sikap Australia tersebut tidak dapat diterima dikarenakan informasi mengenai AUKUS baru disampaikan beberapa jam sebelum peresmian (Chytopoulos 2024). Kehadiran AUKUS membuat Prancis terkejut dan dianggap sebagai perlakuan pelanggaran kepercayaan karena membatalkan perjanjian dengan Prancis secara sepihak. Sebagai Presiden Prancis, Macron memberikan impresi kurang baik mengenai peristiwa tersebut, di mana Macron menuduh Australia berbohong pada pertemuan G20 (Staunton and Day

2023). Kehadiran AUKUS dianggap telah mempermalukan Perancis dan Uni Eropa karena menyoroti kelemahan kekuatan Perancis dan Uni Eropa dalam aspek militer (Amanpour 2021).

Walaupun mempunyai hubungan ekonomi yang baik dengan Tiongkok, Tiongkok menganggap AUKUS sebagai ancaman bagi kedaulatan dan kepentingan nasional Tiongkok. Hadirnya AUKUS juga turut menjadikan hubungan Australia-Tiongkok menurun sehingga adanya penanguhan dilakukan oleh Tiongkok terhadap barang dari Australia. Maka dari itu, posisi Australia sebagai negara anggota dari AUKUS dapat menciptakan ketidakstabilan hubungan ekonomi dengan Tiongkok (Martin 2021). Semenjak 2022, mayoritas publik Australia menilai Tiongkok berpotensi ancaman militer bagi Australia dalam 20 tahun ke depan. Dalam polling Lowy Institute, persepsi publik tersebut konsisten tetap bertahan hingga tahun ini, di mana mencapai angka 69% (Lowy Institute 2025). Hal tersebut menjadi dilema bagi Australia dalam menempatkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok yang di saat bersamaan menjadi sumber ancaman keamanan.

Selain mengalami dilema dari Tiongkok, Australia turut mengalami ketidakpastian politik dari sekutunya, yakni Amerika Serikat. Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2025 menjadi pertanyaan bagi keberlangsungan hubungan aliansi, terutama perjanjian AUKUS. Hal ini dikarenakan Trump sangat dikenal dengan kebijakan isolasionis, sehingga berpotensi membatalkan perjanjian AUKUS dan meninggalkan Australia (Rees 2025). Hal ini diperkuat dengan persepsi publik terhadap kepresidenan Trump dalam 4 tahun ke

depan, di mana 68% masyarakat menyatakan pesimis (Lowy Institute 2025). Situasi ini menjadi sebuah dilema bagi politik Australia, terutama setelah masa transisi dari Partai Liberal terhadap Partai Buruh pada 2022. Seperti diketahui, hingga saat ini, Anthony Albanese sebagai pemimpin Partai Buruh tetap mempertahankan perjanjian AUKUS dengan Amerika Serikat (Wijaya and Hayes 2025). Maka dari itu, keputusan mempertahankan Australia menjadi pertanyaan di tengah dilema Australia dalam menghadapi Tiongkok maupun terpilihnya kembali Donald Trump.

Penelitian ini akan menganalisis mengenai determinan Australia dalam mempertahankan perjanjian pertahanan AUKUS. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “determinan” didefinisikan sebagai “faktor yang mempengaruhi” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.). Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus dalam mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pemerintah Australia dalam mempertahankan AUKUS pada tahun 2025.

1.2 Rumusan Masalah

Di tengah ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, mengapa Australia memutuskan untuk mempertahankan AUKUS pada tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas mengenai mengapa Australia mempertahankan AUKUS pada tahun 2025 sebagai upaya memperkuat keamanan kawasan Indo-Pasifik walaupun mempunyai hubungan ekonomi dengan Tiongkok, Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui determinan Australia dalam mempertahankan AUKUS.

2. Untuk mengetahui fungsi AUKUS sebagai respons kebijakan bagi Australia.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian dari pembahasan faktor pendorong terhadap politik luar negeri Australia terhadap keamanan Indo-Pasifik adalah tahun 2021 sampai 2025. Periode ini merupakan rentang waktu yang sesuai dalam mengetahui determinan pemerintah Australia karena pembentukan AUKUS baru dibentuk pada tahun 2021. Selain itu, terdapat pergantian pemerintahan dari partai Liberal yang awalnya dipimpin oleh Scott Morrison kepada partai Buruh yang dipimpin oleh Anthony Albanese pada tahun 2022. Periode ini menjadi suatu transisi yang menarik karena terdapat perbedaan nilai dan pandangan dari setiap partai politik di Australia dalam menjalankan periode pemerintahannya. Sehingga, hal ini juga bisa berdampak terhadap perbedaan arah pandang politik luar negeri bagi Australia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka dengan topik yang relevan mengenai pembahasan AUKUS. Pertama, penelitian ini menggunakan jurnal artikel yang ditulis oleh Mariane Delanova mengenai dampak pembentukan AUKUS. Marianne menjelaskan, bagi Australia, pembentukan AUKUS didasari akan ancaman langsung oleh Tiongkok dari tindakannya yang asertif. Dengan menggunakan perspektif realisme, Mariane berargumen jika Australia menggunakan AUKUS sebagai distribusi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik melawan ancaman Tiongkok. Sedangkan bagi beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia, AUKUS dianggap sebagai ancaman baru bagi perdamaian dan stabilitas politik di Asia Tenggara. Mariane menjelaskan bahwa kawasan ini tidak memiliki pengaplikasian nilai

demokrasi yang kuat sehingga menjadi hambatan bagi AUKUS. Sehingga, pembentukan AUKUS justru menimbulkan suatu keresahan dan dilema keamanan bagi beberapa negara di Indo-Pasifik. (Delanova 2021).

Mariane menuliskan jika AUKUS dapat berdampak positif bagi keamanan di kawasan karena lahir dari kecemasan dari adanya peningkatan pengaruh kekuatan Tiongkok di kawasan. Namun, adanya ketidakpercayaan terhadap AUKUS bagi beberapa negara di kawasan menjadi tantangan dalam mengimplementasi AUKUS di kawasan (Delanova 2021). Jurnal artikel Mariane memiliki penjelasan yang baik karena dijelaskan secara deskriptif-kualitatif. Namun, jurnal artikel ini masih memiliki pandangan sempit dalam menjelaskan kehadiran AUKUS di kawasan karena hanya ditinjau melalui perspektif realisme. Jurnal artikel ini kurang menjelaskan secara luas dalam menjelaskan pengambilan keputusan Australia dalam menginisiasi pembentukan AUKUS.

Kedua, penelitian ini menggunakan jurnal artikel yang ditulis oleh Mohammad Damayantar dan Imam Zarkachi. Penjelasan jurnal artikel ini mengenai dampak dari AUKUS terhadap keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Jurnal ini berfokus dalam menjelaskan implikasi dari kehadiran AUKUS terhadap keamanan kawasan bagi beberapa negara dalam ancaman keamanan kawasan. Argumen utama dalam jurnal ini menjelaskan bahwa AUKUS adalah usaha dalam menjaga kestabilan dan keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik sebagai respons dari peningkatan pengaruh Tiongkok. Namun, kehadiran AUKUS justru menciptakan dilema keamanan dengan memperparah stabilitas dan keamanan regional kawasan

Indo-Pasifik. Tiongkok sebagai negara yang merasa terancam dari kesepakatan perjanjian ini, turut meningkatkan kapabilitas keamanan negara dengan upaya modernisasi militer. Dengan demikian, alih-alih menciptakan keamanan bagi keamanan terhadap negara-negara di kawasan, AUKUS justru menciptakan tekanan dan ancaman (Damayantar and Zarkachi 2023). Jurnal ini memiliki penjelasan sistematis dan deskriptif sehingga dapat memudahkan para pembaca awam dan baru ingin memulai mengenai AUKUS dan dampaknya terhadap kawasan Indo-Pasifik. Namun, jurnal ini terlalu terpaku akan ancaman dari Tiongkok dan keadaan negara-negara yang berada di Laut Cina Selatan.

Ketiga, penelitian ini menggunakan jurnal artikel ditulis oleh Naufal Nabal Bima Bahari. Dalam penjelasan artikel ini, AUKUS memiliki pengaruh terhadap keamanan dan stabilitas keamanan regional. Dalam penelitian ini, AUKUS ternyata dapat mengancam hubungan ekonomi Australia terhadap Tiongkok, karena Australia merupakan bagian dari anggota AUKUS. Hal ini karena Tiongkok menolak AUKUS, karena AUKUS sendiri ditujukan sebagai penyeimbang dari kekuatan Tiongkok di kawasan. Oleh karena itu, AUKUS menciptakan pergeseran perimbangan kekuatan terhadap stabilitas keamanan di kawasan. AUKUS juga berpotensi melemahkan kerja sama multilateral di kawasan, karena keberadaan aliansi tersebut justru membuat ketidakpercayaan karena adanya ketimpangan kekuatan di kawasan (Bahari 2025). Jurnal ini memiliki pembahasan sederhana, namun pembahasan terlalu berfokus terhadap dampak AUKUS terhadap Tiongkok ASEAN, terutama Indonesia.

Dari ketiga sumber literatur yang telah dipaparkan di atas, bisa terlihat bahwa pembahasan berfokus terhadap dampak dari terbentuknya AUKUS. Ketiga penelitian di atas tidak menjelaskan kausalitas keputusan pemerintah Australia dalam mempertahankan AUKUS secara spesifik dan mendalam. Walaupun penelitian mengenai keamanan di kawasan Indo-Pasifik maupun mengenai AUKUS sudah banyak ditulis, namun kebanyakan pembahasan terhadap topik tersebut terlalu terfokus terhadap rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ASEAN, dan Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam pembahasan AUKUS melalui perspektif Australia. Penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui mengapa Australia mempertahankan AUKUS sebagai suatu kebijakan luar negeri di tengah ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok.

1.6 Kerangka Pemikiran

Tabel 1. Variabel Logika Kausal Realisme Neoklasik

No.	Variabel	Pengertian
1.	Insentif sistemik	Tekanan, peluang, dorongan, atau batasan yang diberikan oleh struktur sistem internasional terhadap suatu negara. Insentif sistemik merupakan faktor eksternal dalam realisme neoklasik.
2.	Kapabilitas material relatif	Kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara dibandingkan negara-negara lain dalam sistem internasional. Kapabilitas material merupakan merupakan sumber insentif sistemik

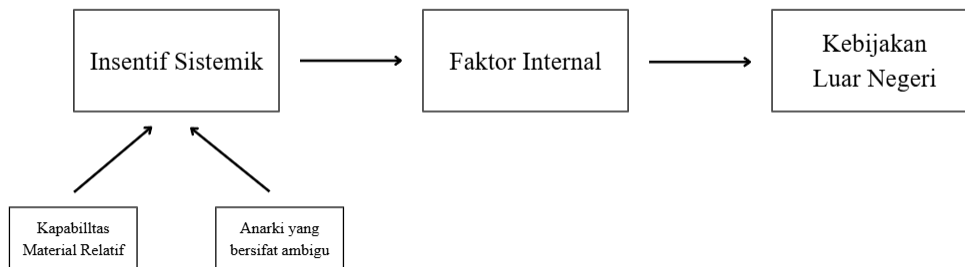
		suatu negara sehingga bersifat sebagai variabel independen.
3.	Anarki yang bersifat ambigu	Sistem internasional yang penuh akan ketidakpastian mengenai niat negara lain. Anarki yang bersifat ambigu juga merupakan sumber dari sumber insentif suatu negara sehingga bersifat sebagai variabel independen.
4.	Faktor internal	Filter domestik oleh pemimpin atau elit politik negara mengenai insentif sistemik. Faktor internal bersifat sebagai variabel yang memediasi insentif sistemik terhadap kebijakan luar negeri.
5.	Kebijakan luar negeri	Respons kebijakan dari insentif sistemik yang diterjemahkan oleh faktor internal. Kebijakan luar negeri bersifat sebagai variabel dependen

Sumber: Rose (1998)

Penelitian ini menggunakan menggunakan teori realisme neoklasik karya Gideon Rose dalam menganalisis determinan Australia dalam mempertahankan AUKUS. Realisme neoklasik merupakan teori kebijakan luar negeri dengan menggabungkan faktor internal dan eksternal dalam keputusan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam teori ini, cakupan dan ambisi kebijakan luar negeri negara didorong terlebih dahulu oleh sistem internasional, terutama kapabilitas material relatif. Namun, pengaruh dari kapabilitas material dalam kebijakan luar negeri tidak bisa diimplementasikan secara langsung karena adanya tekanan sistemik (Rose 1998). Tekanan sistemik tersebut perlu diinterpretasikan terlebih dahulu secara domestik,

terutama oleh pemimpin negara atau para elit politik. Hal ini dikarenakan pemimpin negara merupakan penentu dan pengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman dan persepsi pemimpin negara serta elit politik sangat penting dalam teori realisme neoklasik (Rose 1998).

Diagram 1. Logika Kausal Realisme Neoklasik



Sumber: Rose (Rose 1998, 158)

Dalam menjelaskan keputusan kebijakan luar negeri, realisme neoklasik membantu untuk memahami sifat atau perilaku suatu negara. Teori ini membantu memahami proses formulasi kebijakan luar negeri suatu negara melalui tahapan logika kausal. Tahapan dalam logika kausal realisme neoklasik yakni dengan menjelaskan insentif sistemik yang dihadapi oleh negara sebagai variabel independen. Insentif sistemik merupakan tekanan dari sistem internasional, seperti peningkatan/penurunan kapabilitas material diiringi oleh anarki sistem internasional yang bersifat ambigu (Rose 1998). Setelah itu, insentif sistemik tersebut perlu diterjemahkan oleh faktor internal seperti persepsi dari pemimpin negara atau elit politik. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh faktor citra, psikologis, kultural strategis, institusi domestik, sehingga perdebatan politik internal berpengaruh terhadap

keputusan luar negeri. Maka dari itu, keputusan pemimpin negara dalam kebijakan luar negeri baru dapat dipahami setelah melewati insentif sistemik dan faktor internal (Rose 1998).

1.7 Argumen Sementara

Di tengah ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok, Australia memutuskan mempertahankan AUKUS pada 2025 sebagai respons kebijakan dari kemunculan insentif sistemik terhadap Australia. Pemerintah Australia mendapatkan insentif sistemik melalui pergeseran perimbangan kekuatan dari fenomena kebangkitan Tiongkok di kawasan, terutama oleh modernisasi militernya. Hubungan aliansi militer yang sudah terjalin sudah lama antara Australia-Amerika Serikat turut menjadi faktor dalam keputusan mempertahankan AUKUS. Keputusan Australia memilih untuk mempertahankan AUKUS adalah untuk menjaga keamanan, yang di mana AUKUS memberikan kapabilitas pertahanan bagi Australia. Hal ini turut didukung oleh kebijakan politik bipartisan oleh dua partai besar antara Partai Liberal dan Partai Buruh. Keputusan ini merupakan sebuah bentuk respons kebijakan dalam menjawab tantangan keamanan yang berada di kawasan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pemilihan metode penelitian kualitatif ini dilakukan untuk memahami fenomena keputusan pemerintahan Australia secara mendalam. Oleh

karena itu, metode penelitian kualitatif dapat membantu menguraikan pembahasan fenomena pada penelitian ini (George and Bennett 2007).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan Australia, dengan objek penelitian adalah AUKUS.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan lalu menganalisis data-data sekunder dan sumber-sumber literatur seperti buku, artikel jurnal, laporan, serta dari laman web yang kredibel, aktual, dan terpercaya. Data sekunder yang menjadi rujukan diantaranya adalah Australian Journal of International Affairs, Australian Foreign Affairs, The Commonwealth Journal of International Affairs, Journal of the Indian Ocean Region, Asian Studies Review, Asia-Pacific Review, The Pacific Review, dan beberapa sumber kredibel lainnya (Yin 2018).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan proses *tracing* dengan menelusuri hubungan kausal dari topik yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan menganalisis determinan kebijakan luar negeri Australia dalam pembentukan AUKUS melalui dua variabel yaitu faktor domestik dan faktor eksternal. Baik faktor internal dan eksternal tersebut digunakan untuk memahami kausalitas dari topik terhadap pembentukan kebijakan luar negeri Australia (Collier 2011).

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini akan membahas mengenai latar belakang dari topik yang diangkat, perumusan masalah yang dibahas, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini akan membahas mengenai konteks lintasan hubungan aliansi antara Australia dan Amerika Serikat. Pembahasan ini akan menyoroti bagaimana kebangkitan Tiongkok mempengaruhi aliansi tersebut dan dinamika dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok.

BAB III : Bab ini akan menganalisis determinan Australia dalam mempertahankan AUKUS di tengah ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Pembahasan ini akan menggali determinan dan unsur non-material yang dicari oleh Australia melalui pembentukan AUKUS.

BAB IV : Pembahasan bab ini akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TRAJEKTORI ALIANSI AUSTRALIA-AMERIKA SERIKAT

2.1 Sejarah Australia-Amerika Serikat melalui ANZUS

Setelah Perang Dunia ke-2, politik luar negeri Australia didasari oleh rasa ketakutan akan ancaman-ancaman eksternal dari kawasan. Ketakutan Australia dapat dipahami dari segi geografis, ideologi, dan kontestasi dua negara besar antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Secara geografis, Australia hidup berdampingan dengan sumber ancaman, terutama kebangkitan imperialisme Jepang atau yang biasa didefinisikan dengan ancaman Asia. Selain itu, Australia menghadapi ancaman dari penyebaran ideologi komunisme, keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai Australia yakni demokrasi liberal (McLean 1990). Kedekatan geografis dan pertentangan ideologi menjadi sumber ancaman yang paling ditakutkan oleh Australia karena memiliki sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya dan kapabilitas pertahanan, membuat Australia menjadi negara yang sangat rentan di kawasan (Rollo 2020). Maka dari itu, tantangan yang dihadapi Australia turut mengantarkan kepada ketergantungan dengan kekuatan besar—sebagai sumber penjamin keamanan Australia.

'Great and powerful friends' seperti Amerika Serikat dan Inggris merupakan negara-negara yang dianggap sebagai penjamin keamanan oleh Australia. Robert Menzies merupakan tokoh yang sering menggunakan istilah *'great and powerful friends'* untuk mendefinisikan kebutuhan Australia terhadap kedua kekuatan besar (Gyngell 2021, 62). Secara historis, ketergantungan Australia terhadap kekuatan besar

telah terjadi semenjak Australia baru lahir, seperti peristiwa “Great White Fleet” pada 1908. Alfred Deakin mengundang armada laut Amerika Serikat ke pelabuhan Sydney atas dasar ancaman dari armada laut Jepang. Kunjungan armada laut di Amerika Serikat merupakan peristiwa penting bagi kapabilitas keamanan Australia. Peristiwa “Great White Fleet” merupakan komponen vital bagi strategi keamanan Australia melalui pengalaman langsung dari kekuatan besar, yakni Amerika Serikat (Goldrick 2021). Pengalaman historis ini menunjukkan jika Australia telah mengarahkan kebijakan keamanannya kepada kedua kekuatan besar sebagai penjamin keamanan semenjak lama.

Sebelum Amerika Serikat, Australia memiliki hubungan ketergantungan keamanan dengan Inggris sebagai pelindung di kawasan (Benvenuti 2004). Australia merupakan negara yang lahir dari rahim kerajaan Inggris, dan ketergantungan terhadap Inggris merupakan hal yang lazim bagi Australia. Namun, pengalaman perang dunia ke-2 membuat kekuatan Inggris melemah dan kehilangan posisinya di kawasan, dan hal ini berdampak terhadap Australia. Semenjak kemunduran kekuatan Inggris di Singapura pada tahun 1942, Australia memiliki celah keamanan di kawasan, terutama dari ancaman agresi Jepang (Ford 2021; Walters 2021). Alhasil, peristiwa ini mengantarkan kepada penderitaan para tentara Australia di Singapura dan juga pemboman Darwin—membuat warga Australia semakin ketakutan. Bagi John Curtin, Perdana Menteri Australia ke-14, sikap Inggris dianggap sebagai bentuk pengkhianatan bagi para pasukan Australia (Edwards 2021).

Setelah melemahnya kekuatan Inggris, Australia merasa mendapatkan pengabaian secara psikologis dari hilangnya komitmen Inggris dalam menjaga keamanan di kawasan. Australia merasa dipermalukan oleh Inggris atas dasar sikapnya di panggung internasional, dan dianggap bertindak berbasis emosional dibandingkan rasional. Richard Casey, Menteri Luar Negeri Australia, menganggap jika perbuatan Inggris di kanal Suez menjadi cerminan akan kerakusan atas sumber daya. Hal ini dibuktikan dengan serangan rahasia Inggris, Perancis, dan Israel sehingga menciptakan krisis di kawasan Timur Tengah. Selain itu, bergabungnya Inggris dengan European Economic Community (EEC) dianggap sebagai campakan terhadap Australia secara ekonomi. Pada saat itu, Inggris merupakan mitra ekonomi terbesar Australia dengan nilai ekspor sebanyak 26% pada tahun 1960. Kehilangan kekuatan Inggris baik secara ekonomi dan militer turut menjadi bukti dari perasaan Australia yang diabaikan secara psikologis (Gyngell 2021, 74–82).

Kehilangan posisi strategis Inggris di kawasan menimbulkan dilema keamanan bagi Australia, dan Amerika Serikat dianggap sebagai penjamin bagi keamanan Australia. Setelah peristiwa “Great White Fleet”, pernyataan ketergantungan Australia terhadap Amerika Serikat dapat dilihat pada saat periode John Curtin menjabat. Dalam koran Melbourne Herald, John Curtin menyatakan jika Australia menaruh harapannya kepada Amerika Serikat—dapat meyakinkan Australia untuk bertahan sebagai negara (Bell 1988, 22). Semenjak pernyataan tersebut, misi Australia di kawasan adalah untuk mengamankan kehadiran Amerika Serikat disertai dengan komitmen sebagai penjamin keamanan Australia. Hal ini diperkuat dengan

kepercayaan akan ekspansi komunisme melalui Teori Domino di Asia Tenggara sebagai ancaman langsung untuk Australia. Maka dari itu, bergantung dengan Amerika Serikat merupakan kebutuhan bagi Australia untuk menghindari dan melindungi negara dari ancaman eksternal (Carr 2016).

Pada tahun 1951, Australia, New Zealand, and United States Security Treaty (ANZUS) lahir sebagai sebuah payung keamanan dari ancaman eksternal. Bagi Australia, ANZUS merupakan sebuah dedikasi Percy Spender dalam memastikan komitmen Amerika Serikat untuk menjadi pelindung Australia. ANZUS merupakan kebijakan strategis Australia dalam menjawab ketakutan akan ditinggalkan oleh kekuatan besar—menggaet Amerika Serikat untuk melindungi Australia (Gyngell 2021, 66–72). Di sisi lain, perjanjian ini mengalami proses negosiasi yang cukup panjang atas dasar kurangnya komitmen dari Amerika Serikat. Namun, kericuhan perang Korea mengubah pandangan Amerika Serikat, dan mereka membutuhkan dukungan dari negara lain—Australia dianggap negara yang dapat diandalkan. Bagi Amerika Serikat, ANZUS merupakan cara kompromi mendapatkan dukungan Australia dan Selandia Baru untuk mencegah Jepang jatuh terhadap komunisme. Dan bagi Australia, partisipasi Amerika Serikat dapat memberikan substansi bagi perjanjian keamanan di kawasan—tanpa Amerika Serikat, perjanjian ini tidak berarti (Gyngell 2021, 67; Kelly 2018, 71–82).

Keterlibatan Australia dalam perang Vietnam merupakan bentuk realisasi dan inisiatif pertama implementasi ANZUS sebagai fondasi keamanan kawasan. Australia turut membantu Amerika Serikat di Vietnam atas dasar kewajiban dari artikel 4

ANZUS untuk menjaga keamanan di Pasifik (P. J. Dean et al. 2016, 285). Namun, bagi Australia, keterlibatan di perang Vietnam bukan hanya didasarkan atas kewajiban, melainkan untuk menjaga kehadiran Amerika Serikat di kawasan. Pada dasarnya, ANZUS digunakan oleh Australia untuk mengamankan kapabilitas militer Amerika Serikat di kawasan, serta memperkuat konsep '*forward defense*' Australia (Gyngell 2021, 82–85). Bantuan terhadap konflik Amerika Serikat seperti perang Korea atau Vietnam sangat penting untuk melegitimasi strategi dependensi Australia (Bell 1988, 78). Sebagai hasilnya, Australia meyakini jika melalui aliansi ini, Amerika Serikat akan mempertahankan Australia dari potensi ancaman di masa depan (Cohen 2024).

Walaupun ANZUS mengalami kemunduran setelah 'Doktrin Nixon', ANZUS berperan sebagai elemen penting dalam kebijakan pertahanan dan keamanan Australia. Melalui kemitraan ANZUS, Australia mendapatkan banyak manfaat selain rasa aman dari jaminan kapabilitas militer Amerika Serikat dari ancaman eksternal. Bentuk manfaat yang didapatkan oleh Australia diantaranya adalah akses terhadap fasilitas militer Amerika Serikat, seperti jaringan intelijen dan teknologi. Selanjutnya, ANZUS membuka pintu bagi suara Australia untuk didengar dalam perencanaan kebijakan di Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Australia menempati peran penting dalam kebijakan Amerika Serikat dalam hubungan internasional (Bisley 2013). Maka dari itu, ANZUS dapat menjadi acuan bagi hubungan jangka panjang Australia-Amerika Serikat bagi pertahanan dan kebijakan Australia. Dengan kata lain,

ANZUS bukanlah solusi sementara, melainkan fondasi dasar dalam menciptakan hubungan suportif bagi Australia dan Amerika Serikat (Tan 2021, 20).

2.2 AUKUS

Konsep Indo-Pasifik sering diasosiasikan sebagai prinsip dalam mengelola hubungan dengan kekuatan Tiongkok, dan AUKUS lahir sebagai produk penyeimbang strategis Tiongkok. Indo-Pasifik berdampak terhadap masa depan negara-negara di kawasan, sehingga memastikan kawasan yang bebas dan terbuka sangat penting untuk keamanan kawasan. Maka dari itu, kontestasi dan konektivitas di kawasan ini menjadi sebuah refleksi dalam merespons perluasan kepentingan dan pengaruh Tiongkok (Medcalf 2022). Bagi Australia, AUKUS bukan hanya sekedar penyeimbang Tiongkok, melainkan sebuah jalan untuk memperkuat aliansi bersama kekuatan besar–Amerika Serikat dan Inggris. Melalui pengadaan kapal selam bertenaga nuklir, AUKUS memberikan kapabilitas pertahanan secara signifikan bagi pertahanan dan keamanan Australia. Hal ini turut direfleksikan oleh Australia dengan menjadikan AUKUS sebagai prioritas dalam Tinjauan Strategis Pertahanan 2023. Didasari oleh budaya *Anglosphere*¹, AUKUS menjadi bukti solidaritas dalam merespons perilaku Tiongkok serta untuk menjamin keamanan di kawasan Indo-Pasifik (Australian Government 2023c; Frühling and O’Neil 2025).

Dalam AUKUS, motif Australia memiliki kesamaan dengan pembentukan ANZUS–bergantung kepada ‘*great and powerful friends*’ dalam mencari keamanan.

¹ *Anglosphere* merujuk kepada negara dengan memiliki karakteristik yang sama seperti bahasa, nilai, dan budaya dari warisan Inggris (Haglund 2022).

AUKUS menjadi sebuah titik penting dalam ketergantungan Australia kepada Inggris dan Amerika Serikat dalam konteks keamanan Indo-Pasifik. Kehadiran Amerika Serikat dan Inggris dalam perjanjian ini berkontribusi untuk menjamin fasilitas material pertahanan dan keamanan bersama di kawasan (Gyngell 2021, 62; Seymour, Tom et al. 2022). AUKUS memberikan perkembangan bagi kapabilitas pertahanan maritim Australia dengan mengganti teknologi kapal selam dari konvensional ke nuklir. Sebelum melaksanakan pengadaan kapal selam AUKUS, Australia menerima kapal selam nuklir Virginia-class sebagai pengganti kapal selam konvensional Collins-class. Dalam melancarkan pengadaan teknologi tersebut, ketiga negara AUKUS berinvestasi sebesar \$368 miliar—menjadikan investasi terbesar dalam sejarah kebijakan pertahanan Australia. Keberhasilan Australia dalam AUKUS menjadi bukti bagi keberlanjutan kerja sama tradisional dalam bidang keamanan dengan bergantung terhadap kedua kekuatan besar (Doherty and Daniel 2023; Rees 2025).

Dengan nilai investasi besar, urgensi AUKUS sempat mendapatkan banyak pertanyaan dari para intelektual kebijakan Australia, salah satunya Allan Gyngell. Bagi Allan, baik pemerintahan Australia dianggap telah mengkhianati bangsa Australia dengan tidak menjelaskan justifikasi dalam pembentukan AUKUS. Allan menekankan, pemerintah tidak pernah menjelaskan Tiongkok berperilaku asertif dan mengancam tatanan global, sehingga AUKUS merupakan jawaban dalam permasalahan tersebut (Pearlman 2024). Ternyata, salah satu penyebab keheningan Australia dalam menjawab justifikasi AUKUS adalah masa transisi pemerintahan

Liberal kepada pemerintahan Buruh. Pada saat itu, Scott Morrison hanya memberikan sedikit waktu bagi Anthony Albanese untuk memposisikan diri dalam perjanjian AUKUS. Konsekuensinya, pada peresmian AUKUS, Albanese turut mendukung AUKUS karena penentangan dalam perjanjian ini akan berimplikasi terhadap hubungan Australia-Amerika Serikat (Pearlman 2024).

Tabel 2. Respons Negara-Negara di Kawasan terhadap AUKUS

No.	Negara	Respons
1.	Tiongkok	AUKUS dianggap merusak perdamaian yang berpotensi menciptakan perlombaan senjata.
2.	Indonesia & Malaysia	AUKUS dikhawatirkan mengancam perdamaian dan stabilitas regional.
3.	Filipina & Singapura	AUKUS dinilai bisa menciptakan stabilitas dan perdamaian regional.
4.	Perancis	AUKUS sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjanjian kapal selam dengan Perancis.

Sebagai produk penyeimbang strategis Tiongkok, Australia mendapatkan respons beragam mengenai partisipasinya di AUKUS, terutama Tiongkok dan Perancis. Bagi Tiongkok, AUKUS dapat merusak perdamaian dan stabilitas regional, serta memicu perlombaan senjata karena melibatkan unsur nuklir di dalamnya (Delanova 2021). Tiongkok merespons keras jika keputusan Australia dalam AUKUS dapat memperburuk hubungan bilateral antara Australia terhadap

Tiongkok. Melalui juru bicaranya Zhao Lijian, Tiongkok menyatakan Australia perlu berpikir secara berhati-hati dalam melihat Tiongkok sebagai ancaman atau sebagai mitra (McGuirk 2021). Hal ini turut direspons oleh Indonesia dan Malaysia, kedua negara menilai AUKUS dapat mengancam perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Kontradiktif dengan pernyataan tersebut, Filipina dan Singapura menyambut baik kehadiran AUKUS yang dinilai dapat membentuk perdamaian dan stabilitas regional (Delanova 2021).

Keheningan informasi pembentukan AUKUS juga turut dirasakan oleh Perancis–AUKUS menjadi perjanjian di bawah selimut atau perjanjian dirahasiakan. Pembentukan AUKUS menjadi momen penurunan kualitas hubungan diplomatik antara Australia dan Perancis. Melalui pembentukan AUKUS, Australia membatalkan kontrak sebesar \$90 miliar dalam perjanjian kapal selam dengan perusahaan Perancis yakni Naval Group (Staunton and Day 2023; Taylor 2025). Pembatalan kontrak ini memicu reaksi kemarahan Presiden Macron, dengan menuduh Morrison berbohong soal AUKUS dalam pertemuan G20 pada tahun 2021. Pemerintahan Morrison dianggap tidak bisa memahami jika pembatalan kontrak terhadap Perancis tersebut merupakan sebuah bentuk penghinaan bagi prestise Perancis. Namun, bagi Australia, pembatalan kontrak tersebut merupakan transaksi yang perlu diperlukan–AUKUS dianggap sebagai perjanjian lebih menguntungkan dan bermanfaat bagi Australia. Maka dari itu, keputusan pembatalan kontrak oleh Australia bukanlah keputusan tidak berdasar, melainkan keputusan strategis (Murphy 2021; Staunton and Day 2023).

Kontroversi dari pembuatan AUKUS, hingga pembatalan kontrak dengan Perancis turut menimbulkan pertanyaan bagi pemikir strategis, yakni Hugh White. Pertanyaan White dilandasi oleh motif dan fungsi kapal selam AUKUS yang tidak terlalu beda secara material dengan versi konvensional. Karena pada dasarnya, pemerintah Australia tidak pernah membicarakan rencana untuk penggunaan tenaga nuklir untuk armada kapal selam sebelum hadirnya AUKUS (White 2024). White menentang misinterpretasi pendukung isi perjanjian AUKUS dianggap memberikan armada kapal selam bersenjata nuklir–bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir. Ternyata, keunggulan kapal selam AUKUS adalah kecepatan–kapal selam AUKUS bisa menghindari teknologi pendeteksi musuh lebih mudah dibandingkan konvensional. Sebagai Menteri Industri Pertahanan, Pat Conroy berargumen jika kelebihan kapal selam AUKUS krusial untuk patroli dan perlindungan jalur perdagangan Australia (P. Dean 2023; White 2024).

Dalam meyakinkan substansi AUKUS, Pemerintah Australia mengkonseptualisasikan perjanjian ini dengan rencana jelas dan transparan melalui AUKUS *Pillar One & Pillar Two*. *Pillar One* berisikan penerimaan kapal selam Virginia-class bagi Australia, serta pelatihan dan rotasi angkatan laut negara AUKUS di pelabuhan Australia. *Pillar Two* merupakan perkembangan perjanjian, mencakup perkembangan produksi dan teknologi militer, seperti rudal hipersonik, kecerdasan buatan, dan sebagainya (Markowski et al. 2024). Dalam menjamin keberlangsungan kedua pilar, pemerintah Australia mengidentifikasi melalui “*Optimal Pathway*”, untuk merancang linimasa operasional AUKUS secara efektif dan optimal. Namun,

substansi material dari AUKUS mendapatkan tantangan oleh terhambatnya produksi kapal selam dari Amerika Serikat terhadap Australia. Demi mengefektifkan produksi tersebut, pemerintahan Australia menyuntikan \$4,7 miliar untuk membantu produksi kapal selam Amerika Serikat. Bagi Australia, bantuan dana tersebut sebagai bukti dukungan Australia terhadap Amerika Serikat agar tetap berkomitmen dalam perjanjian AUKUS (Australian Government 2023d; Davies 2024).

Dalam diplomasi AUKUS di kawasan, Penny Wong berpegang pada prinsip keamanan Paul Keating *security in and not from Asia*. Wong menekankan jika pemerintahan Albanese akan tetap berkomitmen terhadap diplomasi regional komitmen di kawasan Asia Tenggara, sesuai dengan tradisi partai Buruh. Wong menggunakan *strategic equilibrium*, untuk mendemonstrasi hak negara di kawasan untuk berdaulat dalam menentukan pilihan, aliansi, dan kerja sama. Bagi Wong, AUKUS merupakan bentuk implementasi dari dua prinsip dan konsep di atas, sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung tujuan kawasan (Gyngell 2021, 22; Patton 2024). Dalam mendukung determinasi AUKUS di kawasan, Australia rajin berinteraksi dengan negara-negara di kawasan mengenai AUKUS. Perjanjian pertahanan dengan Indonesia, pidato Shangri-La Dialogue, dan “Optimal Pathway” merupakan bukti transparansi dan usaha gigih Australia dalam diplomasi AUKUS di kawasan (Patton 2024).

Bagi Australia, AUKUS bukan hanya sekedar perjanjian pertahanan, melainkan pemanfaatan geografi-*pit stop power* untuk memperkuat ikatan strategis dengan Amerika Serikat. Di Indo-Pasifik, Amerika Serikat dianggap sebagai penjaga

stabilitas, dan mendukung tatanan dunia dapat memperkuat keamanan Australia. Program rotasi armada laut AUKUS, melegitimasi kehadiran Amerika Serikat dengan basis menjaga tatanan dunia—sesuai dengan nilai Australia (White 2024; Buchanan 2024). Hubungan antara Australia dan Amerika Serikat, sebagian dipahami akan keputusan Amerika Serikat dalam melihat perjalanan AUKUS. Strategi Australia dalam menjaga Amerika Serikat ini dapat digambarkan melalui “strategic divergence” karya Evan Laksmana. Australia selalu ingin meningkatkan kehadiran Amerika Serikat di kawasan, melalui identifikasi Tiongkok sebagai ancaman, hingga proyek besar seperti AUKUS (Buchanan 2024; Patton 2024).

2.3 Loyalitas Australia terhadap aliansi dengan Amerika Serikat

Dalam menekankan hubungan Australia-Amerika Serikat, Penny Wong menyatakan jika Amerika Serikat adalah ‘*principal ally*’ dan ‘*principal strategic partner*’ bagi Australia. Dalam pertemuan AUSMIN di akhir tahun 2025, pernyataan Wong menunjukkan jika Australia melihat Amerika Serikat sebagai fondasi keamanan negara. Wong juga menekankan komitmen Australia melalui pernyataan “*full steam ahead*”, sekaligus memastikan jika hubungan ini untuk menguntungkan Amerika Serikat (Wong 2025). Menurut Richard Marles, aliansi Australia-Amerika Serikat didorong oleh komitmen terhadap demokrasi, ekonomi terbuka, dan kebebasan serta keadilan sosial. Namun, dalam “Imperfect Union” karya Emma Shortis, menyatakan jika aliansi ini bukan dibentuk oleh demokrasi, melainkan oleh ketakutan keamanan. Melalui konsep ‘Capital A-Alliance’, Shortis menjelaskan aliansi Australia-Amerika Serikat difokuskan akan ketakutan Australia dalam menilai

keamanan. Sehingga, pernyataan dan komitmen Australia terhadap aliansi merupakan jawaban untuk menghilangkan ketakutan terhadap keamanan Australia (Shortis 2023).

Bagi pemikir kebijakan Australia, terdapat keyakinan jika menunjukkan loyalitas terhadap Amerika Serikat dapat membantu keamanan Australia di masa depan. Keikutsertaan Australia dalam kampanye militer Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi bukti loyalitas Australia terhadap Amerika Serikat. Usaha Australia dalam konflik yang melibatkan Amerika Serikat tersebut bukan hanya didasarkan akan aliansi, tetapi juga akan dasar kesediaannya (Taylor 2025; Rees 2025). Dalam “Girt by Sea”, Australia sebagai aktor regional dipahami melalui kerja sama dengan sekutu untuk membentuk tatanan dunia dan keamanan. Dan Amerika Serikat merupakan salah satu sekutu yang selalu dianggap penjaga keamanan internasional bagi Australia. Maka dari itu, Australia dianggap akan bebas dari ancaman karena merupakan sekutu dari Amerika Serikat (Strating and Wallis 2024, 9; White 2025).

Buku Putih Pertahanan 2016 menjustifikasi keikutsertaan Australia terhadap konflik di Timur Tengah sebagai aksi untuk menghentikan terorisme global. Semenjak kejadian 9/11, Amerika Serikat memimpin gerakan mengatasi terorisme global di Timur Tengah melalui “*Global War on Terror*”. Di saat bersamaan, Australia juga memiliki ketakutan terhadap terorisme setelah peristiwa Bom Bali yang menewaskan 88 warga Australia (BBC 2012; Tan 2021). Pemerintah Australia dengan cepat memanggil perjanjian ANZUS untuk pertama kali sebagai respons untuk aksi terorisme global di Afghanistan dan Irak. Tujuan dari aksi tersebut untuk

menginvestigasi potensi aksi terorisme di dekat kawasan yang mengancam keamanan Australia. Setelah peristiwa bom Bali, terdapat peristiwa susulan seperti aksi bom di depan kedutaan Australia dan Hotel Marriot pada tahun 2003. Hal ini menunjukkan jika aksi terorisme semakin nyata bagi Australia, dan pemerintah Australia mulai melihat ancaman non-tradisional seperti terorisme (Strating and Wallis 2024, 14–15).

Dalam merespons aksi terorisme Al-Qaeda di Afghanistan, pemerintah Australia mengumumkan bantuan militer pada 2 Oktober 2001. Australia mengerahkan bantuan terhadap aksi Amerika Serikat melalui pasukan khusus, diperluas dengan bantuan angkatan laut, angkatan darat, dan angkatan udara. Australia berkomitmen terhadap bantuan secara penuh, tetapi tidak ikut serta dalam aksi perdamaian dan rekonstruksi dikarenakan memiliki keterbatasan kapasitas (Gyngell 2021, 255–56). Namun, adanya tekanan Amerika Serikat membuat Australia tetap ikut serta dalam aksi perdamaian dan rekonstruksi di bawah NATO. Setelah beroperasi bertahun-tahun, Amerika Serikat dan NATO menyatakan mundur dari perang di Afghanistan pada tahun 2021—termasuk Australia. Tercatat, sebanyak lebih dari 40.000 personil Australia telah mengabdikan diri di Afghanistan, dengan 41 personil dinyatakan meninggal (Gyngell 2021, 308–10; Department of Veterans' Affairs 2025).

Motif Australia dalam Perang Irak bukan hanya sekedar merespons aksi terorisme, melainkan didorong juga untuk membantu Amerika Serikat dalam aliansi. Adanya asumsi kepemilikan senjata pemusnah massal, serta kedekatan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat menjadi motif kuat dalam konflik di Irak. Bagi

John Howard, Australia akan selalu setia terhadap Amerika Serikat sehingga menjaga loyalitas sangat penting untuk keamanan jangka panjang Australia (Howard 2010, 374; Henry 2020). Setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen, Howard mengirim bantuan pasukan militer ke Irak untuk membantu Amerika Serikat pada tahun 2003. Setelah melakukan invasi, bantuan militer di Irak tidak menemukan tujuan dari motif utama—senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan. Disisi lain, Australia telah mengeluarkan dana sekitar \$8,5 miliar untuk melancarkan bantuan militer di Irak. Walaupun senjata pemusnah massal tidak ditemukan, misi Australia tidak dianggap gagal karena keikutsertaan Australia justru mendekatkan hubungan militer Australia-Amerika Serikat (Dobell 2021; Gyngell 2021, 267).

Setelah meredanya perang di Irak, Australia kembali menunjukkan loyalitasnya terhadap Amerika Serikat dengan mendukung “Pivot to Asia”. Parlemen Australia menyaksikan secara langsung saat Presiden Obama mengumumkan “Pivot to Asia” dalam kunjungannya ke Australia pada November 2011. Dengan mengalihkan fokusnya ke Asia, Obama mengumumkan pengerahan rotasi 2.500 armada laut Amerika Serikat di Australia—untuk meredam pengaruh Tiongkok (Pan 2014; Taylor 2025). Pengerahan armada laut Amerika Serikat dilandasi oleh posisi geografis Australia yang strategis, terutama jika terdapat ancaman rudal Tiongkok. Dalam Buku Putih Pertahanan 2016, Australia mengakui ketergantungan kapabilitas tempurnya kepada Amerika Serikat, dan menjaga aliansi adalah tujuan strategis Australia. Sekitar 60% belanja pertahanan Australia berasal dari Amerika Serikat, hal

ini menegaskan jika Australia sangat mengandalkan Amerika Serikat dalam pertahanan (White 2011; Australian Government 2016, 122).

Sebagai bagian dukungan terhadap Amerika Serikat di kawasan, Australia telah memberikan akses wilayah untuk operasional militer Amerika Serikat di Australia. Australia telah menampung fasilitas intelijen Amerika Serikat semenjak perang dingin, seperti adanya pembangunan di North West Cape dan Pine Gap. Pangkalan intelijen North West Cape dan Pine Gap telah menguntungkan Amerika Serikat dalam pengawasan terhadap aktivitas militer Soviet dan Tiongkok (Wesley 2020; Strating and Wallis 2024, 51). Selain itu, semenjak 2010 Australia telah menggelar latihan militer bersama Amerika Serikat untuk meningkatkan kerja sama militer dan keamanan regional. Rotasi 2.500 marinir pada 2011 diperluas pada 2014, mencakupi angkatan udara dan angkatan darat. Pada 2020, Australia mengeluarkan \$1,1 miliar untuk peningkatan pangkalan udara di Tindal untuk akses armada udara Amerika Serikat (Australian Government 2014; Strating and Wallis 2024, 51).

Australia tidak mempunyai pilihan dalam beraliansi di kawasan, dan Amerika Serikat hadir memperkuat tatanan dunia dan pencegahan regional dari ancaman. Seperti pernyataan mantan pemimpin partai Buruh, Mark Latham, beraliansi dengan Amerika Serikat sangat jauh penting dibandingkan dengan Eropa. Dalam geopolitik, Richard Marles juga menekan jika beraliansi dengan Amerika Serikat ini penting untuk mengamankan kedaulatan Australia (Green 2023). Melalui pembangunan kapabilitas militer, Australia telah yakin dan berkomitmen untuk memilih Amerika Serikat sebagai strategi melawan Tiongkok. Dalam Tinjauan Strategis Pertahanan

2023, Australia telah memilih transisi pertahanan dengan perluasan dan peningkatan kerja sama aliansi dengan Amerika Serikat. Disisi lain, keputusan krusial Australia membawa ancaman besar karena kedekatan geografis dengan Tiongkok berpotensi membuat Australia menjadi target (Australian Government 2023b, 32; Roggeveen 2023a).

BAB III

DETERMINAN AUSTRALIA DALAM MEMPERTAHANKAN AUKUS

3.1 Insentif Sistemik

Dalam melihat determinan Australia dalam mempertahankan AUKUS, munculnya insentif sistemik merupakan tahapan pertama dalam memformulasikan sikap negara dalam realisme neoklasik. Dalam teori ini, insentif sistemik dapat dilihat dari perkembangan kapabilitas material Tiongkok, seperti perkembangan militer, ekonomi, dan politik (Rose 1998). Semenjak reformasi ekonomi, Tiongkok menjadi aktor dominan di kawasan, sehingga menciptakan pergeseran perimbangan kekuatan serta menghasilkan insentif sistemik untuk Australia. Sebagai Presiden Tiongkok, Xi Jinping memiliki ambisi untuk mengincar kekayaan, kontrol, dan kedudukan sebagai tiga hadiah utama kepemimpinannya di kawasan (Medcalf 2023). Dalam memperluas pengaruhnya, ambisi Tiongkok tersebut dimanifestasikan melalui program BRI dalam bentuk bantuan ekonomi seperti pinjaman dana dan proyek infrastruktur. Melalui program tersebut, Tiongkok berhasil menyumbang 19% GDP global dan diperkirakan akan berada di angka 24% pada tahun 2035 (White 2022). Bahkan bagi negara-negara Pasifik, termasuk Australia, Tiongkok merupakan penyumbang dana pembangunan terbesar di kawasan Pasifik, menunjukkan pengaruh kekuatan ekonominya (Medcalf 2023).

Namun, pergeseran perimbangan kekuatan dari kebangkitan Tiongkok justru menciptakan disrupti stabilitas keamanan baik secara ekonomi maupun politik di kawasan. Melalui kebijakan ekonomi, Tiongkok menggunakan program BRI untuk

menciptakan jebakan utang bagi negara peminjam, seperti kasus Sri Lanka dan Maladewa. Jebakan utang tersebut mengantarkan negara peminjam kehilangan kedaulatannya atas akses sumber daya alam domestik sebagai kompromi pembayaran hutang terhadap Tiongkok (Medcalf 2023). Tiongkok memanfaatkan akses atas sumber daya alam domestik negara peminjam sebagai kehadiran aset militer strategis untuk memperkuat kekuatan militer Tiongkok. Perilaku Tiongkok di kawasan tersebut menunjukkan jika Tiongkok berambisi untuk menjadi negara adidaya semakin nyata, diwujudkan melalui perluasan pengaruh ekonomi (Bangkur and Kurniawan 2025). Dengan meluasnya kehadiran Tiongkok di kawasan, hal ini menciptakan tekanan dan guncangan bagi keseimbangan kekuatan negara-negara di kawasan, termasuk Australia (Medcalf 2023).

Selanjutnya, klaim kepemilikan wilayah di Laut Cina Selatan oleh Tiongkok menambah tekanan dan mengancam kedaulatan negara-negara di kawasan. Tiongkok mengklaim Laut Cina Selatan secara sepihak sehingga melanggar hukum internasional UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Kasus Laut Cina Selatan turut menjadi perhatian keamanan kawasan Australia dalam menjaga kedaulatan negara karena kedekatan secara geografis. Bagi Australia, kebijakan asertif Tiongkok dalam mendirikan pangkalan militer di Laut Cina Selatan menjadi ancaman kedaulatan bagi keseimbangan strategis Australia (Tillet 2023). Perilaku asertif Tiongkok tersebut dianggap telah merusak tatanan berbasis aturan yang tidak sesuai pendekatan kebijakan luar negeri Australia (Gyngell 2021, 367). Dalam keamanan maritim, Australia menganut norma kebebasan navigasi atau dikenal

dengan *mare liberum*, dan dominasi Tiongkok dianggap telah merusak tatanan internasional di Indo-Pasifik (Strating and Wallis 2024, 21–26).

Dalam realisme neoklasik, insentif sistemik juga diciptakan oleh ketidakpastian struktural sistem internasional yang mengaburkan interpretasi terhadap niat strategis negara lain. (Rose 1998). Bagi Australia, Tiongkok merupakan mitra dagang utama bagi perekonomian negara, serta ancaman baik secara politik dan ekonomi di saat bersamaan. Australia menerima keuntungan finansial signifikan melalui perjanjian ChAFTA 2015, dengan Tiongkok menjadi tujuan ekspor utama Australia sebesar 42,11% (Australian Bureau of Statistics 2020). Kegiatan ekspor tersebut dioperasikan melalui jalur maritim, dan Australia telah menerima keuntungan sebesar \$354,8 miliar dari perdagangan maritim 2020-2021 (Australian Government 2023a). Tetapi, pertumbuhan armada laut dan pembangunan fasilitas militer di jalur perdagangan maritim membuat ketidakpastian bagi kebijakan ekonomi Australia terhadap Tiongkok. Ketidakpastian Tiongkok digambarkan dengan fenomena *sea blindness*—kurangnya kepekaan Australia terhadap keamanan maritim—karena Tiongkok beresiko merusak aktivitas ekonomi Australia (Strating and Wallis 2024, 26–27).

Ketidakpastian politik Australia terhadap Tiongkok semakin terasa ketika hubungan kedua negara semakin memanas pada masa jabatan Scott Morrison tahun 2018-2021. Pada masa ini, hubungan Australia dengan Tiongkok dipenuhi dengan drama oleh pertikaian politik dari kedua belah pihak, sehingga menimbulkan sanksi politik. Semenjak 2018, Australia menerapkan kebijakan larangan teknologi 5G dari

perusahaan Huawei dan ZTE, serta menginvestigasi terhadap barang impor dari Tiongkok. Alhasil, Tiongkok memprotes kebijakan Australia serta merespons dengan menerapkan kebijakan anti dumping dan anti subsidi terhadap produk gandum dari Australia. Menjelang akhir 2020, kedutaan besar Tiongkok di Australia memperburuk keadaan dengan merilis 14 keluhan terhadap Australia melalui media lokal Australia (Fitzsimmons 2023, 167–70; Zhang and Wang 2023). Peristiwa tersebut membuat gambaran mengenai motif Tiongkok terhadap Australia buram, dan peristiwa ini menciptakan ketidakpastian bagi kebijakan Australia terhadap Tiongkok.

Selain Tiongkok, Australia juga merasakan ketidakpastian dari Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan negara mengenai motif dan peran terhadap kawasan Indo-Pasifik. Kebangkitan Tiongkok melalui modernisasi militer dan kebijakan BRI menurunkan pengaruh dan kapabilitas material negara lain, termasuk Amerika Serikat (Rees 2025). Menurunnya pengaruh kapabilitas militer Amerika Serikat menimbulkan pertanyaan komitmen mengenai kehadiran Amerika Serikat di kawasan, terutama terhadap keamanan Australia. Sebagai gambaran, pada 2020 postur militer Amerika di Jepang berjumlah 55.000 pasukan, peningkatannya tidak signifikan dibandingkan 45.000 pasukan pada 1991. Selain itu, jumlah militer Amerika di Korea Selatan menurun dari 40.000 pasukan pada 1991 menjadi 26,000 pada 2020 (Roggeveen 2023b, 42–45). Hal ini menunjukkan jika kapabilitas militer Amerika Serikat tidak memiliki peningkatan signifikan, bahkan terdapat penurunan di beberapa negara tertentu. Menurunnya pengaruh militer Amerika Serikat oleh

kebangkitan Tiongkok memicu kekhawatiran bagi Australia terhadap komitmen keamanan Amerika Serikat di kawasan.

Ketidakpastian dari Amerika Serikat semakin meningkat ketika periode pertama kepresidenan Trump dengan menurunnya komitmen terhadap multilateralisme, perdagangan bebas, dan aliansi. Pada periode ini, Amerika Serikat menerapkan kebijakan 'America First', artinya Amerika Serikat memprioritaskan kepentingan nasional domestik dibandingkan komitmen eksternal. Alhasil, pada periode ini Amerika Serikat keluar dari Perjanjian Iklim Paris, UNESCO, WHO, Kemitraan Trans-Pasifik, dan beberapa perjanjian lainnya (Gyngell 2021, 361). Kepresidenan Trump memberikan tekanan kepada sekutu untuk melakukan kontribusi lebih bagi pertahanan dan perdagangan dengan Amerika Serikat, termasuk Australia. Bagi Australia, kepresidenan Trump merupakan periode yang tidak terprediksi dan membuat ketidakpastian bagi keamanan Australia dari sekutu terbesarnya di kawasan. Periode ini merupakan pertama kalinya Australia merasa tidak aman di Asia oleh '*great and powerful friend*', yakni Amerika Serikat (White 2025). Dan pada tahun 2025, kembalinya kepresidenan Trump akan beresiko bagi jaminan keberlangsungan AUKUS, serta memperkuat ketidakpastian bagi Australia (Rees 2025).

Dalam menjelaskan determinan Australia di AUKUS, insentif sistemik Australia berasal dari pergeseran kekuatan dan ketidakpastian sistem internasional di kawasan. Sesuai realisme neoklasik, insentif sistemik muncul dari ketidakpastian sistem internasional serta perubahan kapabilitas material relatif negara lain (Rose 1998). Fenomena kebangkitan Tiongkok, serta ketidakpastian motif Tiongkok dan

Amerika Serikat terhadap Australia merupakan sumber insentif sistemik bagi Australia. Insentif sistemik tersebut menjadi sebuah pendorong bagi negara untuk merespons melalui kebijakan, seperti keputusan Australia mempertahankan AUKUS. Namun, insentif sistemik tersebut perlu disaring terlebih dahulu oleh aktor domestik, seperti pemimpin negara, para elit, dan persepsi masyarakat (Rose 1998). Oleh karena itu, insentif sistemik Australia akan diinterpretasikan oleh elit politik sebagai tahapan lanjutan dari keputusan kebijakan luar negeri negara.

3.2 Faktor Internal sebagai Filter Domestik Australia

Dalam realisme neoklasik, pemahaman aktor domestik dalam merespons insentif sistemik penting dalam melihat motif kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam realisme neoklasik, aktor domestik menginterpretasi insentif sistemik melalui perubahan kekuatan dan kapabilitas material negara lain untuk menciptakan respons kebijakan (Rose 1998). Dalam determinan Australia dalam mempertahankan AUKUS, negara memahami pergeseran perimbangan kekuatan melalui kebangkitan Tiongkok dan menurunnya kapabilitas material Amerika Serikat. Australia mengakui pergeseran perimbangan kekuatan melalui Tinjauan Strategis Pertahanan 2023, menyatakan jika Amerika Serikat sudah bukan pemimpin unipolar di Indo-Pasifik. Australia juga mengidentifikasi kompetisi intens ditunjukkan oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, dan motif kedua negara tersebut sebagai penentu keberlangsungan kawasan (Australian Government 2023b). Dalam realisme neoklasik, Tinjauan Strategis Pertahanan dipahami sebagai laporan formal dan respons dari tekanan eksternal akibat pergeseran kekuatan di kawasan (Rose 1998). Tinjauan Strategis

Pertahanan menjadi bukti nyata jika tokoh politik Australia sudah mengakui pergeseran perimbangan kekuatan di kawasan tersebut nyata.

Dalam memahami pergeseran perimbangan kekuatan tersebut, neoklasikal melihat persepsi ancaman dari insentif sistemik oleh pemimpin dan tokoh elit Australia. Dalam realisme neoklasik, persepsi ancaman merupakan faktor non-struktural bagi elit Australia dalam memitigasi dari potensi konflik dan pilihan kebijakan negara (Rose 1998). Bagi elit Australia, pergeseran perimbangan kekuatan memicu ketidakpastian keamanan bagi politik dan keamanan Australia di kawasan, seperti yang disampaikan tokoh Liberal. Morrison mengatakan jika Australia menghadapi dunia yang lebih rapuh, diperebutkan, dan bahkan bisa lebih terfragmentasi dibandingkan Perang Dunia kedua (Morrison 2022). Peter Dutton—Menteri Pertahanan periode Morrison—menegaskan jika pergeseran perimbangan kekuatan membuat lingkungan Australia tidak terprediksi dan semakin kompleks dibandingkan sebelumnya (Dutton 2021b). Dutton kembali menegaskan, Australia saat ini sedang mengalami ketidakpastian yang besar dan tensi tinggi dalam posisinya di kawasan (Dutton 2021b).

Partai Buruh juga menyatakan perhatian mengenai terancamnya keamanan Australia di kawasan dengan menyoroti konflik dan kompetisi sebagai pembentuk ketidakpastian. Albanese menanggapi jika saat ini Australia hidup dalam linimasa ketidakpastian politik mendalam, baik di kawasan maupun di seluruh dunia (Albanese 2023a). Marles juga menyuarakan pandangan serupa jika lingkungan global semakin tidak pasti dan lebih genting semenjak berakhirnya Perang Dunia kedua (Marles

2022b). Marles menyatakan jika adanya persaingan kekuatan besar di kawasan menandakan sebuah realitas, yakni berakhirnya era perluasan nilai demokrasi (Marles 2023a). Ketidakpastian global dari kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok terbukti membuat perhatian para elit politik mengenai jaminan keamanan Australia di kawasan. Persepsi para elit Australia menunjukkan jika Australia sedang mengalami kecemasan strategis, dimana Australia sensitif akan perubahan struktural dalam sistem internasional (Zhang and Wang 2023).

Realisme neoklasik membantu memahami sudut pandang para elit Australia dalam melihat ancaman dari kebangkitan Tiongkok, terutama dari peningkatan kapabilitas material (Rose 1998). Australia melihat kebangkitan Tiongkok sebagai negara yang berpotensi mengancam perdamaian dan keamanan Australia melalui dominasi kekuatan ekonomi dan militernya. Dengan memaksimalkan potensi ekonomi dan militernya, Tiongkok berpotensi akan memiliki niatan untuk membawa Australia dalam konflik di kawasan (Strating and Wallis 2024, 16). Bagi Partai Liberal, Morrison menginterpretasikan dominasi Tiongkok dengan mencari kelemahan dan perpecahan di negara-negara barat sebagai strategi negara (Morrison 2022). Dutton menambahkan, dominasi Tiongkok dapat dilihat dari kepemilikan 355 armada laut, jumlah tersebut sangatlah luar biasa dibandingkan jumlah kapabilitas Australia (Dutton 2021c). Bagi Dutton penambahan armada Tiongkok tersebut didorong oleh mentalitas *zero-sum*, hal ini sangat mengancam keamanan Australia di kawasan (Dutton 2021b).

Partai Buruh memberikan persepsi serupa dalam melihat ancaman Tiongkok, tetapi ancaman Tiongkok di sini dilihat dengan menitikberatkan bobot kekuatan strategis Tiongkok. Albanese melihat perkembangan militer Tiongkok telah meningkatkan tensi dan menciptakan disrupti di kawasan, seperti militerisasi di Laut Cina Selatan (Morrison 2022). Bagi Marles, asertivitas Tiongkok merupakan ambisi untuk mempertahankan kedaulatannya, terlihat dari ekspansi armada kapal selam menjadi 20 unit pada 2023 (Marles 2023c). Perilaku asertif Tiongkok turut diekspresikan oleh publik Australia dalam melihat perkembangan kapabilitas material Tiongkok sebagai ancaman bagi Australia. Melalui survei opini publik Lowy Institute 2021, sebanyak 65% publik menyatakan jika Tiongkok dapat mengancam kepentingan strategis Australia (Kassam 2022). Dari pandangan elit serta publik Australia, dapat disimpulkan jika kebangkitan Tiongkok telah menjadi ancaman bagi kepentingan dan keamanan Australia. Hal ini turut dipahami dalam Tinjauan Strategis Pertahanan 2023 dengan memandang Tiongkok menciptakan disrupti terhadap keamanan tatanan internasional (Australian Government 2023b).

Menurut realisme neoklasik, kerangka berpikir pemimpin negara dipengaruhi oleh ideasional, ideologi, sejarah, budaya, dan kemampuan bertahan hidup di lingkungan sendiri (Rose 1998). Dalam aliansi Australia-Amerika Serikat, Australia mempunyai dua orientasi budaya strategis dalam kebijakan luar negeri, yakni *'crusaders'* dan *'pragmatists'*. Budaya *'crusaders'* melihat aliansi melalui persamaan nilai dan ideologi—Australia dan Amerika Serikat merupakan negara yang mengedepankan nilai liberal dan demokrasi. *'Crusaders'* menjelaskan jika Australia

perlu bergabung dengan Amerika Serikat dalam menyeimbangi kekuatan Tiongkok atas dasar demokrasi dan nilai aliansi (Wesley 2017, 83–85). Sedangkan budaya *'pragmatists'* melihat aliansi terhadap kalkulasi keuntungan–Australia beraliansi dengan Amerika Serikat didasarkan akan pemenuhan terhadap tujuan dan kepentingan nasional. *"Pragmatists"* melihat Australia tidak perlu memilih dalam kompetisi Amerika Serikat-Tiongkok, melainkan melihat dari manajemen risiko terhadap kepentingan Australia (Wesley 2017, 86–88). Pada praktiknya, kedua orientasi budaya strategis ini digunakan dalam manajemen aliansi dengan Amerika Serikat serta dalam merespons kebijakan di kawasan.

Dalam merespons aliansi dengan Amerika Serikat, elit Australia seringkali menggabungkan kedua orientasi budaya strategis *'crusaders'* dan *'pragmatists'*. Melalui pidato Morrison, Partai Liberal menekankan aliansi dengan Amerika Serikat bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan di kawasan. Morrison menambahkan, ditopang nilai liberal dan nilai demokratis, Australia mengutamakan kebebasan dan tatanan dunia berbasis aturan dibandingkan otokrasi dan tirani (Morrison 2022). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Dutton dengan menekankan akan kerja sama dengan negara dengan pemikiran serupa seperti Amerika Serikat. Dutton menyatakan, aliansi yang kuat dengan negara pemikiran serupa merupakan hal penting dalam mencegah otokrasi dan menjaga kepentingan nasional Australia (Dutton 2021a). Kedua tokoh merepresentasikan *'crusaders'* melalui nilai liberal, serta *'pragmatists'* melalui pemenuhan kepentingan Australia dalam melihat aliansi dengan Amerika Serikat.

Partai Buruh melakukan hal sama dengan menggabungkan kedua orientasi budaya strategis *'crusaders'* dan *'pragmatists'* terhadap aliansi dengan Amerika Serikat. Melalui pernyataan Marles, aliansi Australia-Amerika Serikat memberikan Australia kapabilitas material, teknologi, dan keuntungan intelijen yang tidak bisa dikembangkan secara mandiri. Dalam segi nilai, hubungan aliansi ditopang dengan persamaan nilai terhadap komitmen demokrasi, ekonomi terbuka, dan masyarakat yang bebas dan adil (Marles 2022a). Namun, dalam pendekatan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan, partai Buruh lebih cenderung melihat aliansi secara *'pragmatists'* karena memiliki keterbatasan. Pemahaman ini ditunjukkan oleh Albanese dengan menyatakan bahwa hubungan aliansi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Australia. Maka dari itu, Albanese menekankan jika hubungan aliansi perlu ditinjau melalui kalkulasi berdasarkan manfaat terhadap kepentingan Australia (Albanese 2023c). Partai Buruh maupun Liberal memandang aliansi didasarkan atas nilai, tetapi Buruh cenderung menekankan aliansi atas kalkulasi keuntungan bagi kepentingan Australia.

Orientasi budaya strategis *'security in and not from Asia'* juga merupakan faktor berpengaruh terhadap persepsi elit Australia dalam kebijakan keamanan. Orientasi ini melihat Australia perlu aktif terlibat dan merasa aman di Asia, namun Australia mendapatkan keamanan dari sekutu lamanya—Amerika Serikat. Hidup berdampingan bersama negara-negara dengan karakteristik, kebiasaan, dan budaya berbeda membuat Australia memilih untuk mengedepankan kepentingan keamanan dengan Amerika Serikat (Gyngell 2021, 22). Ketakutan ditinggalkan sekutu

merupakan faktor psikologis dalam memperkuat persepsi elit Australia dalam ketergantungan dengan Amerika Serikat terhadap kebijakan luar negeri (Gyngell 2021, 406). Tercantum dalam Tinjauan Strategis Pertahanan 2023, kondisi geografis Australia terutama fenomena kebangkitan Tiongkok telah mempengaruhi imajinasi strategis Australia di kawasan (Australian Government 2023b). Maka dari itu, pemerintahan Albanese menyatakan hubungan dengan Amerika Serikat bukan hanya menjamin stabilitas, melainkan keamanan dan kesejahteraan di kawasan (Marles 2022b).

Dalam determinan Australia terhadap AUKUS, realisme neoklasik merangkai insentif sistemik, persepsi ancaman, dan kultur strategis sebagai faktor pendorong pembuatan kebijakan. Faktor tersebut mendorong elit Australia memobilisasi kapasitas negara sebagai respons kebijakan demi memenuhi kepentingan negara, termasuk keputusan Australia dalam AUKUS (Rose 1998). Bagi partai Liberal, pembentukan AUKUS dilandasi akan munculnya ancaman keamanan di kawasan dari peningkatan kapabilitas melalui modernisasi militer. Morrison melegitimasi pembentukan AUKUS sebagai langkah dalam menjaga persamaan nilai negara sekutu, serta menjaga keamanan dan kesejahteraan Indo-Pasifik (Morrison and Dutton 2021). Melihat dari Pembaruan Strategis Pertahanan 2020, pemerintahan Morrison memobilisasi kapasitas negara melalui peningkatan kapabilitas pertahanan, terutama peningkatan sektor keamanan maritim. Peningkatan kapabilitas tersebut bertujuan untuk mengarahkan postur keamanan demi mencegah kepentingan Australia terbebaskan dari ancaman di kawasan (Australian Government 2020).

Bagi pemerintahan Albanese, keputusan partai Buruh dalam mempertahankan AUKUS diputuskan melalui legitimasi birokrasi dan kebijakan stabilisasi demi memenuhi kepentingan Australia. Dalam konferensi nasional partai Buruh, sebanyak 402 dari 452 delegasi menyatakan setuju untuk melanjutkan program kapal selam bertenaga nuklir AUKUS (Bangkur and Kurniawan 2025). Pemerintahan Albanese melegitimasi AUKUS sebagai upaya meningkatkan kapabilitas, memperkuat keamanan nasional, serta mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan (Marles 2023b). Tetapi, pemerintahan Albanese tetap berupaya menjaga stabilitas kepentingan ekonomi melalui stabilisasi hubungan dagang dengan Tiongkok sebagai mitra utama. Didasari pendekatan *'pragmatists'*, pemerintahan Albanese berhasil menstabilisasi hubungan ekonomi dengan Tiongkok melalui kunjungannya dengan Xi Jinping di Beijing. Pemerintahan Albanese menunjukkan manajemen relasi di tengah kompetisi strategis di kawasan untuk tetap menjaga kepentingan Australia (Chan and Pan 2025; Pooley 2025). Oleh karena itu, Albanese mempertahankan AUKUS bertujuan menghilangkan ancaman keamanan, sedangkan stabilisasi ekonomi dilakukan demi memenuhi kepentingan ekonomi Australia.

3.3 AUKUS sebagai Respons Kebijakan

Keputusan Australia mempertahankan AUKUS merupakan fase akhir dari logika kausal analisis determinan Australia dalam AUKUS sebagai pilar kebijakan keamanan. Dalam realisme neoklasik, AUKUS merupakan respons kebijakan dari hasil muncul insentif sistemik yang difilter oleh persepsi elit Australia. AUKUS muncul sebagai respons dalam menjelaskan perilaku negara disesuaikan oleh persepsi

ancaman, kultur strategis, serta memobilisasi kapasitas negara menjadi kebijakan luar negeri (Rose 1998). Sebagai respons kebijakan, Australia melihat AUKUS untuk menjawab insentif sistemik dari kompetisi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan. AUKUS dilandasi dari urgensi Australia untuk secara mandiri menjaga keamanannya tanpa terlalu bergantung dengan Amerika Serikat dalam menghadapi tantangan kawasan. Dalam konteks tersebut, perjanjian keamanan AUKUS merupakan manifestasi pemerintahan Australia dalam menerjemahkan tantangan menjadi sebuah kebijakan. Bagi Australia, AUKUS menjadi sebuah cara untuk tetap bisa berkontribusi untuk stabilitas regional dengan meningkatkan kemandirian dalam menjaga keamanan kawasan (Strating and Wallis 2024, 18).

Sebagai respons terhadap memburuknya lingkungan strategis Australia, AUKUS menjadi instrumen bagi panduan strategis kerangka pertahanan negara. Sebagai instrumen, AUKUS menjawab buku Buku Putih Pertahanan 2016 dengan menciptakan stabilitas Indo-Pasifik berbasis aturan, serta untuk mendukung kepentingan Australia (Australian Government 2016; Strating and Wallis 2024, 23). AUKUS berperan menjadi panduan dan instrumen dalam Tinjauan Strategis Pertahanan 2023 untuk memperkuat strategi pertahanan Australia di kawasan. Dalam dokumen tersebut, Australia menghadapi kompetisi kekuatan besar di kawasan, sehingga pemerintah Australia menganut pendekatan strategis terhadap persaingan kekuatan besar. Melalui AUKUS, Tinjauan Strategis Pertahanan memproyeksikan AUKUS untuk meningkatkan fokus diplomasi serta pelatihan militer regional Australia di Indo-Pasifik. Maka dari itu, Tinjauan Strategis Pertahanan melihat

keberhasilan AUKUS sangat penting untuk memperoleh keamanan negara dari kapabilitas asimetris di kawasan (Australian Government 2023b).

Selain itu, perjanjian AUKUS membantu menghilangkan ketidakpastian struktural dari pergeseran perimbangan kekuatan bagi Australia di kawasan. Perhatian domestik dalam memandang kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman yang signifikan menjadi faktor utama dari ketidakpastian struktural bagi keamanan Australia (Korolev 2023). Selain itu, periode kepresidenan pertama Trump menciptakan ambiguitas mengenai reliabilitas Amerika Serikat terhadap sekutunya, terutama Australia (Fortier and Massie 2023). Periode kepresidenan Joe Biden dilihat sebagai momentum hilangnya ketidakpastian akan ketidakpastian struktural, terutama melalui komitmen Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Periode Biden kembali memperkuat hubungan aliansi dengan sekutu tradisional yang didasari akan nilai demokrasi dan menjaga tatanan internasional berbasis aturan. Pemerintahan Biden memperkuat hubungan dengan Australia, terutama melalui AUKUS, sebagai aset strategis terbesar Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok. Maka dari itu, kehadiran Amerika Serikat melalui AUKUS memberikan jaminan keamanan bagi Australia atas jawaban ketidakpastian struktural (Korolev 2023).

Selanjutnya, AUKUS menjadi platform bagi Australia dalam meningkatkan kapabilitas material terhadap ancaman dari modernisasi militer Tiongkok (Bookenstein 2021). Setelah melalui filter domestik mengenai persepsi ancaman di kawasan, Australia melihat modernisasi militer menjadi tantangan besar terhadap keamanan negara. Melalui AUKUS, Australia dapat meningkatkan daya tangkal

strategis dan kapabilitas material maritimnya untuk merespons modernisasi militer Tiongkok. Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir oleh AUKUS secara langsung meningkatkan postur strategis keamanan Australia terhadap potensi konflik di kawasan (Hellyer and Nicholls 2022, 7). Oleh karena itu, hadirnya AUKUS membuat Australia lebih siap secara kapabilitas dalam merespons ancaman militer Tiongkok. Untuk Australia, AUKUS memberikan fasilitas keamanan pertahanan demi menjaga kedaulatan negara dari tindakan asertif Tiongkok di kawasan (O’Conner et al. 2023).

Bagi Australia, AUKUS merupakan perpanjangan tradisi dan budaya dalam bergantung kepada negara besar, terutama Amerika Serikat. Dilandasi faktor psikologis ketakutan akan ditinggalkan, AUKUS mendemonstrasi kebijakan pertahanan Australia dengan bergantung kepada sekutu dalam respons terhadap dinamika regional (Bangkur and Kurniawan 2025). Keputusan Australia ditopang oleh strategi pertahanan kontinental dengan menjaga wilayah darat maupun laut dari ancaman di kawasan (Kuper 2019). Strategi tersebut dipengaruhi oleh doktrin *forward defence* yang lahir dari kerja sama strategis dengan Amerika Serikat pada Perang Dingin. Hal ini menunjukkan dalam *security in and not from Asia*, Australia konsisten menjalin kerja sama dengan negara berlatar belakang serupa. Maka dari itu, AUKUS dilihat sebagai sarana Australia mempertahankan dominasi rasial kulit putih dalam menghadapi ancaman non-kulit putih di kawasan (Clayton and Newman 2023).

AUKUS menjadi sarana dalam memperkuat budaya strategis Australia dalam menghadapi tantangan di kawasan, melalui aliansi dengan Amerika Serikat. Dipengaruhi oleh budaya *‘pragmatists’* dan *‘crusaders’*, Australia melihat AUKUS

sebagai kebijakan berdasarkan ideologi serta kalkulasi bagi kepentingan Australia. Bagi partai Liberal, AUKUS dilihat sebagai suatu langkah besar bagi Australia dalam perkembangan kapabilitas pertahanan setelah perjanjian ANZUS. Morrison menjelaskan jika pengadaan kapal selam AUKUS sangat menguntungkan karena daya tahan, kecepatan, dan kemampuannya lebih unggul dari versi konvensional (Morrison 2021). Dalam konferensi pers, Morrison menekankan jika perjanjian AUKUS didasarkan akan persamaan nilai antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Morrison menginterpretasikan eksistensi AUKUS sebagai bentuk persahabatan dan komitmen dari hubungan sekutu yang telah terjalin semenjak lama (Morrison 2021).

Partai Buruh turut memiliki pandangan yang serupa dalam melihat AUKUS sebagai upaya untuk memperkuat budaya strategis Australia. Melalui budaya '*pragmatists*' dan '*crusaders*', Partai Buruh memosisikan pandangan terhadap AUKUS didasari akan persamaan kepercayaan dan kepentingan nasional. Serupa dengan pernyataan Morrison, Albanese menyampaikan AUKUS sebagai investasi terbesar dalam sejarah Australia dalam kapabilitas pertahanan negara. Albanese memandang AUKUS memberi keunggulan pertahanan di masa depan, sehingga investasi ini memperkuat keamanan nasional Australia dan stabilitas kawasan (Albanese 2023b). Selanjutnya Albanese berpendapat jika ketiga negara AUKUS diikat oleh persamaan nilai dan keyakinan bahwa kedaulatan dari setiap negara harus dihormati. Maka dari itu, Albanese menegaskan kerja sama dalam AUKUS bertujuan untuk menjaga nilai-nilai, kedaulatan negara, dan keamanan (Albanese 2023b).

Melihat dari persepsi Morrison dan Albanese, elit Australia menilai AUKUS berlandaskan persamaan nilai, kepentingan negara, serta memperkuat hubungan aliansi.

AUKUS sendiri memiliki perbedaan fokus dengan Quadrilateral Security Dialogue (Quad) walaupun dibentuk melalui persamaan motif akan fenomena kebangkitan Tiongkok. Melalui Quad 2.0, fokus Quad telah beralih dari kerjasama keamanan tradisional menjadi kerja sama keamanan non-tradisional sejak 2021 (Bisley 2025). Australia sendiri tetap berkomitmen dalam Quad, di mana Australia merupakan salah satu kontributor finansial yang cukup besar bagi Quad. Sebagai bentuk komitmen, Australia telah menyumbangkan lebih dari \$500 miliar dalam inisiatif kesehatan Quad mengenai distribusi vaksin terhadap negara-negara di Indo-Pasifik. Hal ini tentunya berbeda dengan AUKUS yang memiliki fokus untuk pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bagi kapabilitas maritim Australia. AUKUS sendiri juga turut dilihat sebagai penguatan (Taylor 2025). Perbedaan signifikan Quad dan AUKUS sangat terlihat, di mana Quad berfokus terhadap isu non-keamanan, sedangkan AUKUS berfokus pada isu keamanan.

Sehingga, AUKUS merupakan respons dalam bentuk *balancing* dari modernisasi militer Tiongkok, bukan pemisahan ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Memperkuat hubungan aliansi dengan Amerika Serikat merupakan strategi *balancing* Australia dalam mengimbangi peningkatan kapabilitas militer Tiongkok (Bisley 2025). Melalui akuisisi kapal selam bertenaga nuklir serta inovasi militer pada *Pillar Two*, AUKUS mempersiapkan Australia terhadap keamanan dan

pertahanan negara (Markowski et al. 2024). Demi kepentingan ekonomi negara, Australia tetap menjaga hubungan dagang dengan Tiongkok di tengah polemik AUKUS. Dalam kunjungannya ke Tiongkok, Albanese mempertegas mengenai pentingnya menjaga hubungan dengan Tiongkok untuk keberlangsungan ekonomi Australia (Tingle 2025). Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama bagi Australia, menyumbang sebesar 24% total ekspor perdagangan barang dan jasa negara pada 2024-2025 (Australian Government 2026).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

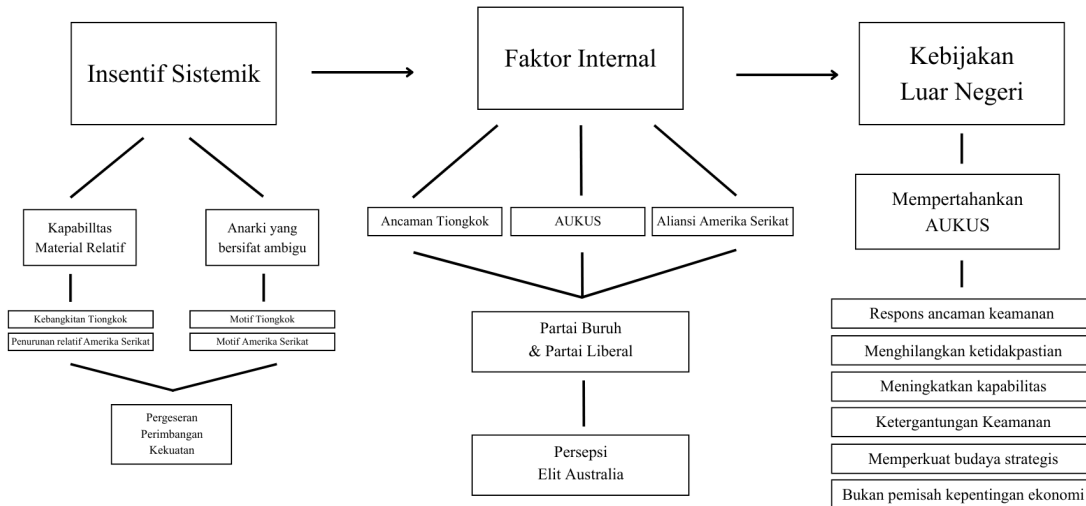
Australia, sebagai salah satu negara yang hidup di lingkup Indo-Pasifik, menghadapi dilema dari rivalitas dua negara besar di kawasan. Kebangkitan Tiongkok melalui program BRI dan juga modernisasi militer membuat negara tersebut memiliki pengaruh yang kuat di kawasan. Dan bagi Australia, Tiongkok merupakan mitra dagang utama, sehingga hubungan ekonomi Tiongkok merupakan salah satu aspek penting bagi kepentingan nasional. Di sisi lain, Australia juga berhubungan dengan Amerika Serikat sebagai sekutu lama yang dilandasi akan faktor ideologi dan faktor historis. Secara historis, Australia telah mengarahkan kebijakan keamanannya dengan bergantung kepada Amerika Serikat sebagai pelindung negara. Oleh karena itu, Australia berada di posisi ambigu dalam persaingan Amerika Serikat-Tiongkok, terutama kedua negara merupakan aktor penting bagi Australia.

Kehadiran perjanjian AUKUS meningkatkan polemik bagi posisi Australia dalam persaingan Amerika Serikat-Tiongkok. Pada dasarnya, AUKUS dibentuk sebagai pencegahan akan modernisasi militer Tiongkok di kawasan, dan Australia ikut bagian dalam perjanjian ini. Dan bagi Australia, AUKUS memiliki manfaat bagi keamanan Australia melalui pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Dengan bertujuan untuk mencegah militer Tiongkok, keputusan Australia dalam mempertahankan AUKUS menjadi sebuah pertanyaan dalam penelitian ini. Hal ini karena Tiongkok merupakan mitra dagang utama bagi Australia, dan keputusan

dalam AUKUS berpotensi merusak hubungan ekonomi tersebut. Maka dari itu, penelitian ini menelusuri determinan Australia dalam mempertahankan AUKUS di tengah ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok.

Berikut merupakan tampilan diagram mengenai determinan Australia mempertahankan AUKUS di tengah ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok melalui logika kausal realisme neoklasik

Diagram 4. Determinan Australia dalam Mempertahankan AUKUS



Dalam mengetahui determinan Australia, penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik karya Gideon Rose dengan melihat faktor eksternal dan internal. Penelitian ini menggunakan teori ini sebagai kerangka dalam menjelaskan logika kausal mengenai keputusan Australia dalam mempertahankan AUKUS. Dalam logika realisme neoklasik, kebijakan luar negeri merupakan respons dari hasil filter domestik akan insentif sistemik yang dihadapi negara. Insentif sistemik dan filter domestik dipengaruhi oleh asumsi dari peningkatan kapabilitas material dan juga anarki sistem

internasional yang bersifat ambigu. Dalam teori ini, keputusan pemimpin negara dilihat lebih dalam melalui karakter pemimpin negara sebagai penentu kebijakan luar negeri. Dan keputusan pemimpin negara tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persepsi ancaman, ideologi, psikologis, dan kultural strategis.

Melihat dari kacamata realisme neoklasik, penelitian ini menganalisis bahwa Australia menghadapi insentif sistemik dari perimbangan pergeseran kekuatan di kawasan. Kebangkitan Tiongkok melalui modernisasi militer dan pengaruhnya di kawasan menjadi suatu tekanan sistemik bagi Australia. Selain itu, Australia turut menghadapi ketidakpastian struktural terhadap niat Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai mitra strategis. Walaupun mempunyai hubungan ekonomi, Tiongkok bertindak secara asertif seperti di Laut Cina Selatan, sehingga Australia tidak memiliki kepastian motif Tiongkok. Hal serupa terjadi terhadap sekutu lama Amerika Serikat melalui kepresidenan Trump, dimana Trump memberikan tekanan terhadap aliansi, seperti kepada Australia. Maka dari itu, Australia sedang menghadapi insentif sistemik dari ketidakpastian dan juga peningkatan kapabilitas material suatu negara di kawasan.

Selanjutnya, dalam realisme neoklasik, insentif sistemik tersebut perlu di filter oleh aktor domestik seperti para elit negara. Elit Australia memahami adanya ketidakpastian struktural dari perimbangan kekuatan yang menciptakan rivalitas dua negara besar di kawasan. Setelah itu, elit Australia turut melihat kebangkitan Tiongkok sebagai ancaman bagi keamanan Australia melalui modernisasi militernya, sehingga dianggap menciptakan disrupti. Sesuai dengan tradisi, Australia seringkali

merespons ancaman keamanan melalui aliansi karena dipengaruhi oleh kultur strategis, seperti *'crusaders'* dan *'pragmatists'*. Elit Australia menempatkan hubungan aliansi berdasarkan ideologi serta kepentingan Australia, seperti AUKUS didasari akan persamaan ideologi serta untuk menjaga keamanan negara. Dalam hal ini, AUKUS dapat menciptakan stabilitas keamanan di kawasan, tetapi Australia tidak memungkiri akan pentingnya hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Maka dari itu, keputusan elit Australia mempertahankan AUKUS juga tetap diiringi oleh stabilisasi ekonomi dengan Tiongkok sesuai dengan kepentingan negara.

Setelah melewati insentif sistemik dan filter domestik, penelitian ini melihat AUKUS sebagai sebuah respons kebijakan dari elit Australia. Sebagai respons kebijakan, AUKUS dapat diinterpretasikan menjadi sebuah jawaban dari pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan keamanan di kawasan. AUKUS berperan menjadi fondasi bagi strategi pertahanan Australia dalam menghadapi kompetisi strategis Amerika Serikat-Tiongkok, tercantum dalam Tinjauan Strategis Pertahanan 2023. AUKUS juga menghilangkan ketidakpastian struktural dengan mengembalikan komitmen Amerika Serikat terhadap aliansi, dilandasi akan keputusan historis dan kepentingan Australia. Oleh karena itu, AUKUS turut memperkuat kultural strategis Australia dengan meningkatkan kapabilitas material negara dalam sektor keamanan. Tetapi, pemerintah Albanese tetap mempertegas jika AUKUS tidak menjadi pemisah ketergantungan ekonomi Australia terhadap Tiongkok. Melainkan, AUKUS diposisikan sebagai kebijakan dalam sektor keamanan, sehingga Tiongkok tetap menjadi mitra dagang utama bagi Australia.

4.2 Rekomendasi

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat dijadikan acuan menjadi beberapa rekomendasi yang bisa digunakan oleh penelitian berikutnya, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya bisa melanjutkan mengenai kelanjutan dan polemik AUKUS karena seperti diketahui perjanjian ini mencakup rentang waktu yang cukup lama.
2. Selain itu, kembalinya periode kepresidenan Donald Trump dapat mempengaruhi mengenai kelangsungan dari AUKUS, sehingga peneliti selanjutnya bisa meneliti akan tantangan yang dihadapi di era Trump.
3. Peneliti selanjutnya bisa mempertajam analisis kerangka realisme neoklasik, dengan melihat lebih dalam terhadap institusi non-pemerintah.
4. Peneliti selanjutnya bisa melihat persepsi dari negara lain dalam keputusan mempertahankan AUKUS, seperti persepsi Amerika Serikat atau Inggris.
5. Dan terakhir, peneliti selanjutnya bisa menggunakan kerangka teori lain dalam menganalisis keputusan Australia dalam mempertahankan AUKUS.

DAFTAR PUSTAKA

- Albanese, Anthony. 2023a. "Address to the National Press Club." February 22. <https://anthonyalbanese.com.au/media-centre/address-to-the-national-press-club>.
- Albanese, Anthony. 2023b. "AUKUS Remarks." Speech. Prime Minister of Australia, March 14. <https://www.pm.gov.au/media/aukus-remarks>.
- Albanese, Anthony. 2023c. "Australia in the World - 2023 Lowy Lecture." Speech. Prime Minister of Australia, December 19. <https://www.pm.gov.au/media/australia-world-2023-lowy-lecture>.
- Amanpour, Amanpour. 2021. "EU Chief: Treatment of France 'Not Acceptable.'" *CNN*, September 20. <https://edition.cnn.com/videos/tv/2021/09/20/amanpour-ursula-von-der-leyen-aukus-eu-france.cnn>.
- Amin, Huma, and Arslan Rafique. 2021. "The Maritime Rise of China in Indo-Pacific and Indo-US Counter Balancing Approach." *Journal of Political Science and International Relations* 4 (1): 18. <https://doi.org/10.11648/j.jpsir.20210401.13>.
- Anam, Syaiful, and Ristiyani Ristiyani. 2018. "Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 14 (2): 217–36. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>.
- Australian Bureau of Statistics. 2020. *Australia's Trade in Goods with China in 2020*. <https://www.abs.gov.au/articles/australias-trade-goods-china-2020#cite-window2>.
- Australian Government. 2014. *United States Force Posture Initiatives*. Defence cooperation framework. Australian Government. <https://www.defence.gov.au/defence-activities/programs-initiatives/united-states-force-posture-initiatives>.
- Australian Government. 2016. *2016 Defence White Paper*. Defence White Paper. Australian Government. <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/defence-white-paper>.
- Australian Government. 2020. *Defence Strategic Update 2020*. Defence Strategic Update. Department of Defence. <https://www.defence.gov.au/about/strategic-planning/2020-defence-strategic-update>.
- Australian Government. 2023a. *Australian Sea Freight 2020–21*. Statistical Report.

Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Arts.
<https://www.bitre.gov.au/sites/default/files/documents/Australian%20Sea%20Freight%202020-21.pdf>.

Australian Government. 2023b. *Defence Strategic Review 2023*. Defence Strategic Review. Department of Defence.
<https://www.defence.gov.au/about/reviews-inquiries/defence-strategic-review>.

Australian Government. 2023c. *National Defence: Defence Strategic Review*. Commonwealth of Australia.

Australian Government. 2023d. *Pathway to Australia's Nuclear-Powered Submarine Capability*. Australian Submarine Agency.

Australian Government. 2026. *China Country Brief*. Department of Foreign Affairs and Trade. <https://www.dfat.gov.au/geo/china/china-country-brief>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. "Determinan." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Accessed February 26, 2026.
<https://kbbi.web.id/determinan>.

Bahari, Naufal Nabal Bima. 2025. *Dampak AUKUS Terhadap Stabilitas Keamanan Di Indo Pasifik Dan Hubungan*. January.
https://www.researchgate.net/publication/387673337_Dampak_AUKUS_Terdahap_Stabilitas_Keamanan_di_Indo-Pasifik_dan_Hubungan?enrichId=rgreq-cda3fd657d536e427c2ae9af9d06260e-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzM4NzY3MzMzNzZtBUzoxMTQzMtI4MTMwMTA2MTcyNEAxNzMIODc4OTU4NTQy&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf.

Bangkur, Agnes Deandra, and Yandry Kurniawan. 2025. "When International Dynamics and Domestic Interests Collide: Australia's Decision in a Quest for Nuclear-Powered Submarines." *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 8 (1): 130–51. <https://doi.org/10.1080/25751654.2025.2491862>.

BBC. 2012. *Indonesia's Bali Marks Deadly Bombings 10 Years On*. October 12.
<https://www.bbc.com/news/world-asia-19906863>.

Bell, Coral. 1988. *Dependent Ally: A Study in Australian Foreign Policy*. Second edition. Vol. 95. Allen & Unwin.
<https://www.jstor.org/stable/10.2307/2164444?origin=crossref>.

Benvenuti, Andrea. 2004. "Shifting Priorities: Australia's Defence Ties to Britain in the Aftermath of Empire." *History Compass* 2 (1).
<https://doi.org/10.1111/j.1478-0542.2004.00108.x>.

- Bisley, Nick. 2013. “‘An Ally for All the Years to Come’: Why Australia Is Not a Conflicted US Ally.” *Australian Journal of International Affairs* 67 (4): 403–18. <https://doi.org/10.1080/10357718.2013.803029>.
- Bisley, Nick. 2025. “The Quad, AUKUS and Australian Security Minilateralism: China’s Rise and New Approaches to Security Cooperation.” *Journal of Contemporary China* 34 (154): 564–76. <https://doi.org/10.1080/10670564.2024.2365241>.
- Bookenstein, Guy. 2021. “AUKUS and Beyond – Managing the Messaging with Our Indo-Pacific Partners.” Asia Society, September 16. <https://asiasociety.org/australia/aukus-and-beyond-managing-messaging-our-indo-pacific-partners>.
- Buana, Aldino Cakra, Aswin Vanesh Riyanto, Bulan Talita, et al. 2023. *DAMPAK PAKTA AUKUS PADA KEAMANAN ASIA-PASIFIK DALAM GEOPOLITIK INDO-PASIFIK DENGAN ASIA-PASIFIK*. 4 (5).
- Buchanan, Elizabeth. 2024. “Pit Stop Power: How to Use Our Geography.” In *Dead in the Water: The AUKUS Delusion*. Australian Foreign Affairs.
- Carr, Andrew. 2016. “ANZUS and Australia’s Role in World Affairs.” In *Australia’s American Alliance*. Melbourne University Press.
- Chan, Edward Sing Yue, and Guangyi Pan. 2025. *Pragmatic Engagement – What Albanese’s Visit Reveals about China Relations in a Turbulent World*. July 18. <https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2025/07/albanese-china-visit-what-it-reveals-about-china-relations>.
- Chansoria, Monika. 2023. *Japan’s Confluence of the Two Seas Conception: The Influence of Mughal Prince Dara Shikoh’s 1655 Text “Majma’-Ul-Bahrain” [The Mingling of the Two Oceans]*.
- Chytoupoulou, Eleni. 2024. “ASEAN and European Union Addressing the Challenges of the 21st Century.” *Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne* 17 (3): 373–407. <https://doi.org/10.2478/ers-2024-0021>.
- Clayton, Kate, and Katherine Newman. 2023. “Settler Colonial Strategic Culture: Australia, AUKUS, and the Anglosphere.” *Australian Journal of Politics & History* 69 (3): 503–21. <https://doi.org/10.1111/ajph.12941>.
- Cohen, Michael D. 2024. “The Origins of the ANZUS Alliance.” *Australian Journal of International Affairs* 78 (5): 561–66. <https://doi.org/10.1080/10357718.2024.2393846>.
- Collier, David. 2011. “Understanding Process Tracing.” *PS: Political Science &*

- Politics* 44 (4): 823–30. <https://doi.org/10.1017/S1049096511001429>.
- Damayantar, Mohammad, and Imam Zarkachi. 2023. *Analysis of The Effect of The AUKUS Defense Pact on Indo-Pacific Security*.
- Davies, Andrew. 2024. “Sunk Costs: Our High-Stakes Gamble on Nuclear-Powered Submarines.” In *Dead in the Water: The AUKUS Delusion*. Australian Foreign Affairs.
- Dean, Peter. 2023. “AUKUS Alliance: In Our High-Risk Climate, Speed to Capability Vital.” *United States Studies Center*, March 15. <https://www.ussc.edu.au/aucus-alliance-in-our-high-risk-climate-speed-to-capability-vital>.
- Dean, Peter J., Stephan Frühling, and Brendan Taylor, eds. 2016. *Australia’s American Alliance*. Melbourne University Press.
- Delanova, Mariane Olivia. 2021. “DAMPAK PAKTA PERTAHANAN TRILATERAL AUKUS TERHADAP KONDISI REGIONAL INDO-PASIFIK.” *Jurnal Dinamika Global* 6 (02): 259–85. <https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.408>.
- Department of Veterans’ Affairs. 2025. “Australians in the War in Afghanistan 2001 to 2021.” ANZAC Portal, December 24. <https://anzacportal.dva.gov.au/wars-and-missions/war-in-afghanistan-2001-2021>.
- Dirgantoro, Bagus, Veri Arinal, and Refi Nabillah Royadi. 2024. “Dampak Penerapan Jalur Sutra Tiongkok Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia.” *JURNAL TREN BISNIS GLOBAL* 4 (1). <https://doi.org/10.38101/jtbg.v4i1.11821>.
- Djuyandi, Yusa, Adilla Qaia Illahi, and Adinda Corah Habsyah Aurel. 2021. “KONFLIK LAUT CHINA SELATAN SERTA DAMPAKNYA ATAS HUBUNGAN SIPIL MILITER DI ASIA TENGGARA.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5 (1): 112. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i1.2021.112-124>.
- Dobell, Graeme. 2021. “ASPI’s Decades: The Iraq War.” *Australian Strategic Policy Institute*, August 30. <https://www.aspistrategist.org.au/aspi-decades-the-iraq-war/>.
- Doherty, Ben, and Hurst Daniel. 2023. “What Is the Aucus Submarine Deal and What Does It Mean? – The Key Facts.” *The Guardian*, March 14. <https://www.theguardian.com/world/2023/mar/14/what-is-the-aucus-submarine-deal-and-what-does-it-mean-the-key-facts>.

- Dutton, Peter. 2021a. “Address to Australian Strategic Policy Institute Conference, Canberra.” Speech. Minister for Defence Australia, June 10. <https://www.minister.defence.gov.au/speeches/2021-06-10/address-australian-strategic-policy-institute-conference-canberra>.
- Dutton, Peter. 2021b. “Address to the American Chamber of Commerce in Australia.” Speech. Minister for Defence Australia, September 8. <https://www.minister.defence.gov.au/speeches/2021-09-08/address-american-chamber-commerce-australia>.
- Dutton, Peter. 2021c. “National Press Club Address, Canberra, ACT.” Speech. Minister for Defence Australia, November 26. <https://www.minister.defence.gov.au/speeches/2021-11-26/national-press-club-address-canberra-act>.
- Edwards, Peter. 2021. “Curtin, MacArthur and the Pacific War.” In *ANZUS at 70: The Past, Present and Future of the Alliance*. Australian Strategic Policy Institute.
- Fitzsimmons, David. 2023. *Australia’s Relations with China: The Illusions of Choice, 1972-2022*. Routledge.
- Ford, Shannon Brandt. 2021. “The Evolution of the US—Australia Strategic Relationship.” In *The Future of the United States-Australia Alliance*. Routledge.
- Fortier, Maxandre, and Justin Massie. 2023. “Strategic Hedgers? Australia and Canada’s Defence Adaptation to the Global Power Transition.” *International Journal: Canada’s Journal of Global Policy Analysis* 78 (3): 463–78. <https://doi.org/10.1177/00207020231195633>.
- Fravel, M. Taylor. 2015. “China’s New Military Strategy: ‘Winning Informationized Local Wars.’” *China Brief* 15 (13): 3–7.
- Frühling, Stephan, and Andrew O’Neil. 2025. “Beyond AUKUS: Could Australia Get the Bomb?” In *The Bomb: Will Asia Go Nuclear*. Australian Foreign Affairs.
- George, Alexander L., and Andrew Bennett. 2007. “Case Studies and Theory Development in the Social Sciences.” *Perspectives on Politics* 5 (1): 187–88. <https://doi.org/10.1017/S1537592707070491>.
- Goldrick, James. 2021. “Foundations: The Great White Fleet and the Beginnings of the Security Partnership.” In *ANZUS at 70: The Past, Present and Future of the Alliance*. Australian Strategic Policy Institute.
- Grant, Stant. 2022. “China’s Rise Supercharged Australia’s Economy. But Now That’s Unravelling, and the Albanese Government Faces a Serious

- Challenge.” *ABC News*.
<https://www.abc.net.au/news/2022-11-06/china-rise-australia-economic-growth-albanese-hawke-lesson/101615854?future=true&>.
- Green, Michael J. 2023. “The View from America: We’re Still Your Best Bet.” In *We Need to Talk about America: An Alliance in Flux*. Australian Foreign Affairs.
- Gyngell, Allan. 2021. *Fear of Abandonment: Australia in the World since 1942*. Updated Edition. La Trobe University Press.
- Haglund, David G. 2022. *Rise and Demise of an Anglo-American Policy Idea*.
- Harahap, Fathin Nisa Muthia. 2020. *Analisis Potensial Tiongkok Untuk Menjadi Negara Hegemon Di Kawasan Asia Timur Melalui Strategi One Belt One Road*. 6 (2): 164–72.
- Hellyer, Marcus, and Andrew Nicholls. 2022. *‘Impactful Projection’: Long-Range Strike Options for Australia*. Australian Strategic Policy Institute.
- Henry, Iain D. 2020. “Adapt or Atrophy? The Australia-U.S. Alliance in an Age of Power Transition.” *Contemporary Politics* 26 (4): 402–19. <https://doi.org/10.1080/13569775.2020.1777043>.
- Howard, John. 2010. *Lazarus Rising: A Personal and Political Autobiography*. HarperCollins Australia.
- Huang, Yiping. 2016. “Understanding China’s Belt & Road Initiative: Motivation, Framework and Assessment.” *China Economic Review* 40 (September): 314–21. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.07.007>.
- Kassam, Natasha. 2022. *Safety and Threats to Australia’s Interests*. Lowy Institute. <https://poll.lowyinstitute.org/report/2022/safety-and-threats-australias-interests/#report>.
- Kelly, Andrew. 2018. *ANZUS and the Early Cold War: Strategy and Diplomacy between Australia, New Zealand and the United States, 1945-1956*. 1st ed. Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/OBP.0141>.
- Kitaoka, Shinichi. 2019. “Vision for a Free and Open Indo-Pacific.” *Asia-Pacific Review* 26 (1): 7–17. <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1618592>.
- Korolev, Alexander. 2023. “Transition from Hedging to Balancing in Australia’s China Policy: Theoretical and Empirical Explorations.” *Australian Journal of International Affairs* 77 (5): 548–68. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2274446>.

- Kuper, Stephen. 2019. "Australia Forward: Balancing Expeditionary and Continental Defence Capabilities (Part 6)." *Defence Connect*, April 15. <https://www.defenceconnect.com.au/geopolitics-and-policy/3897-australia-forward-balancing-expeditionary-and-continental-defence-capabilities-part-6?>
- Lowy Institute. 2025. *China as a Military Threat*. Lowy Institute Poll 2025. Lowy Institute. <https://poll.lowyinstitute.org/charts/china-as-a-military-threat/>.
- Markowski, Stefan, Robert Wylie, and Satish Chand. 2024. "The AUKUS Agreement: A New Form of the Plurilateral Defence Alliance? A View from Downunder." *Defense & Security Analysis* 40 (3): 430–49. <https://doi.org/10.1080/14751798.2024.2385704>.
- Marles, Richard. 2022a. "Address: Center for Strategic and International Studies (CSIS)." Speech. Minister for Defence Australia, July 12. <https://www.minister.defence.gov.au/speeches/2022-07-12/address-center-strategic-international-studies-csis>.
- Marles, Richard. 2022b. "Address to the Sydney Institute Annual Dinner Lecture." Speech. Minister for Defence Australia, November 14. <https://www.minister.defence.gov.au/speeches/2022-11-14/address-sydney-institute-annual-dinner-lecture>.
- Marles, Richard. 2023a. "Address to the Opening of the Seoul Defence Dialogue 2023." Speech. Minister for Defence Australia, October 18. <https://www.minister.defence.gov.au/speeches/2023-10-18/address-opening-seoul-defence-dialogue-2023>.
- Marles, Richard. 2023b. "AUKUS Nuclear-Powered Submarine Pathway." Speech. Minister for Defence Australia, March 14. <https://www.minister.defence.gov.au/media-releases/2023-03-14/aucus-nuclear-powered-submarine-pathway>.
- Marles, Richard. 2023c. "News Corp's Defending Australia, Australian War Memorial." Speech. Minister for Defence Australia, May 22. <https://www.minister.defence.gov.au/speeches/2023-05-22/news-corps-defending-australia-australian-war-memorial>.
- Martin, Lucy. 2021. "Experts Say China Trade Sanctions over AUKUS Deal Unlikely, but Flag Long-Term Concerns." *ABC News*, September 17. <https://www.abc.net.au/news/2021-09-17/australia-aucus-subs-deal-unlikely-result-trade-sanctions/100469936>.
- McGuirk, Rod. 2021. *Australia: Strategic Shifts Led It to Acquire Nuclear Subs*. <https://apnews.com/article/joe-biden-business-france-europe-united-states-96f95120345a56d950961b41a74d9355>.

- McLean, David. 1990. "AMERICAN AND AUSTRALIAN COLD WARS IN ASIA." *Australia New Zealand American Studies Association, Australasian Journal of American Studies*, vol. 9 (2): 33–46.
- Medcalf, Rory. 2022. "The Season of Caucuses: QUAD, AUKUS, and the Exclusive-Inclusive Duality of Indo-Pacific Asia." Expert Speak. Observer Research Foundation. https://www.researchgate.net/profile/Samir-Saran/publication/360861301_Raisina_Files_2022/links/628f45b18d19206823dc4a28/Raisina-Files-2022.pdf#page=94.
- Medcalf, Rory. 2023. "Sea of Many Flags: A Pacific Way to Dilute China's Influence." In *Girt by China: Powerplay in the Pacific*. Australian Foreign Affairs.
- Morrison, Scott. 2021. "IN FULL: PM Scott Morrison Speaks after AUKUS Submarine Announcement | ABC News." YouTube, ABC News (Australia), September 16. <https://www.youtube.com/watch?v=o8Gknmk6FDo>.
- Morrison, Scott. 2022. "An Address by Prime Minister Scott Morrison." Lowy Institute, March 4. <https://www.lowyinstitute.org/publications/address-prime-minister-scott-morrison>.
- Morrison, Scott, and Peter Dutton. 2021. "Joint Media Statement: Australia to Pursue Nuclear-Powered Submarines through New Trilateral Enhanced Security Partnership." Speech. Minister for Defence Australia, September 16. <https://www.minister.defence.gov.au/statements/2021-09-16/joint-media-statement-australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security-partnership>.
- Morrison, Scott, Johnson, Boris, and Biden, Joseph. 2023. "Joint Leader Statement." Prime Minister of Australia. <https://www.pm.gov.au/media/joint-leaders-statement-aucus>.
- Murphy, Katharine. 2021. "Macron Accuses Australian PM of Lying over Submarine Deal." *The Guardian* (Rome). <https://www.theguardian.com/world/2021/oct/31/macron-accuses-australian-pm-of-lying-over-submarine-deal>.
- Nindya, Annisa Putri, and Rifqy Alief Abiyya. 2022. "Pengaruh AUKUS terhadap Stabilitas Indo-Pasifik dan Sikap Indonesia [The Influence of AUKUS to Indo-Pacific Regional Stability and Indonesia's Stance]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 13 (1): 67–84. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2917>.

- O’Conner, Brendon, Lloyd Cox, and Danny Cooper. 2023. “Australia’s AUKUS ‘Bet’ on the United States: Nuclear-Powered Submarines and the Future of American Democracy.” Pt. 45-64. *Australian Journal of International Affairs* 77 (1). <https://doi.org/doi.org/10.1080/10357718.2022.2163977>.
- Pan, Chengxin. 2014. “The ‘Indo-Pacific’ and Geopolitical Anxieties about China’s Rise in the Asian Regional Order.” *Australian Journal of International Affairs* 68 (4): 453–69. <https://doi.org/10.1080/10357718.2014.884054>.
- Patton, Susannah. 2024. “Widening the Gap: How South-East Asia Views AUKUS.” In *Dead in the Water: The AUKUS Delusion*. Australian Foreign Affairs.
- Pearlman, Jonathan. 2024. *Dead in the Water: The AUKUS Delusion*. Australian Foreign Affairs.
- Pedrasan, Rodon. 2021. “Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi.” *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 7 (1): 88–95. <https://doi.org/10.29210/02021830>.
- Pooley, Ethan. 2025. “The Stabilisation Framework: Managing Australia’s Great Power Relationship.” Australian Institute of International Affairs, February 10. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-stabilisation-framework-managing-australias-great-power-relationship>.
- Rees, Morgan. 2025. “AUKUS as Ontological Security – Australian Foreign Policy in an Age of Uncertainty.” *Australian Journal of International Affairs* 79 (1): 91–109. <https://doi.org/10.1080/10357718.2024.2409358>.
- Roggeveen, Sam. 2023a. “Target Australia: Is the Alliance Making Us Less Safe?” In *We Need to Talk about America: An Alliance in Flux*. Australian Foreign Affairs.
- Roggeveen, Sam. 2023b. *The Echidna Strategy: Australia’s Search for Power and Peace*. La Trobe University Press.
- Rollo, Stuart. 2020. “The ‘Asia Threat’ in the US–Australia Relationship: Then and Now.” *International Relations of the Asia-Pacific* 20 (2): 225–52. <https://doi.org/10.1093/irap/lcy023>.
- Rose, Gideon. 1998. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy.” *World Politics* 51 (1): 144–72. <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>.
- Saeed, Muhammad. 2017. “From the Asia-Pacific to the Indo-Pacific: Expanding Sino-U.S. Strategic Competition.” *China Quarterly of International Strategic Studies* 03 (04): 499–512. <https://doi.org/10.1142/S2377740017500324>.

- Seymour, Tom, Gregory, Sean, McIntyre, Amanda, Wotton, Tetyana, and Loughridge, James. 2022. *Maximising Australia's AUKUS Opportunity*. Policy & Strategic Analysis Report (Defence–Industry–Economy). PricewaterhouseCoopers Australia.
- Shoebridge, Michael. 2021. “What Is AUKUS and What Is It Not? How Does It Connect to the Quad, the Sydney Dialogue, ASEAN and Indo-Pacific Security?” *Australian Strategic Policy Institute*, November.
- Shortis, Emma. 2023. “Imperfect Union: Towards an Alliance Based on Hope, Not Fear.” In *We Need to Talk about America: An Alliance in Flux*. Australian Foreign Affairs.
- Staunton, Eglantine, and Benjamin Day. 2023. “Australia-France Relations after AUKUS: Macron, Morrison and Trust in International Relations.” *Australian Journal of International Affairs* 77 (1): 11–18. <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2070599>.
- Strating, Rebecca, and Joanne Wallis. 2024. *Girt by Sea: Re-Imagining Australia's Security*. La Trobe University Press.
- Tan, Andrew TH. 2021. “Security Threats and Challenges to Australia.” In *The Future of the United States-Australia Alliance*. Routledge.
- Taylor, Brendan. 2025. “Australian Agency and the China–US Contest for Supremacy.” *Australian Journal of International Affairs* 79 (4): 618–35. <https://doi.org/10.1080/10357718.2025.2471360>.
- Tillet, Andrew. 2023. “Australia Wary of US Request to Protect Red Sea Shipping.” *Financial Review*, December 14. <https://www.afr.com/world/middle-east/australia-wary-of-us-request-to-protect-red-sea-shipping-20231214-p5erfh>.
- Tingle, Laura. 2025. “Anthony Albanese’s China Visit Sought to ‘Stabilise the Relationship.’” *ABC News*, July 19. <https://www.abc.net.au/news/2025-07-19/anthony-albanese-china-visit-cheng-du-xi-jinping-donald-trump/105529240>.
- Trisni, Sofia. 2025. “Navigating Great Power Rivalry: Australia Between the United States and China.” *Journal of Law and Social Transformation* 3 (2).
- Vuving, Alexander L. 2021. “The Strategic Environment of the USA-Uustralia Alliance in the Indo-Pacific Era.” In *The Future of the United States-Australia Alliance*. Routledge.
- Walters, Patrick. 2021. *ANZUS at 70: The Past, Present and Future of the Alliance*.

Australian Strategic Policy Institute.

- Wesley, Michael, ed. 2017. *Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century*. ANU Press.
- Wesley, Michael. 2020. "Beijing Calling: How China Is Testing the Alliance." In *Can We Trust America? A Superpower in Transition*. Australian Foreign Affairs.
- White, Hugh. 2011. "The Obama Doctrine: The U.S. Plan to Take on China Recalls Harry Truman's Containment of the Soviet Union." *The Wall Street Journal*, November 25. <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204452104577057660524758198>.
- White, Hugh. 2022. "Sleepwalk to War: Australia's Unthinking Alliance with America." In *Quarterly Essay 86: On Alliance Failure and China Delusions*. Quarterly Essay.
- White, Hugh. 2024. "Fatal Shores: AUKUS Is Grave Mistakes." In *Dead in the Water: The AUKUS Delusion*. Australian Foreign Affairs.
- White, Hugh. 2025. "The End of the World as We Know It." In *Hard New World: Our Post-American Future*. Quarterly Essay.
- Wijaya, Trissia, and Ali Hayes. 2025. "AUKUS 'behind the Scenes': Through the Lens of Militarised Neoliberalism." *Australian Journal of International Affairs* 79 (1): 110–31. <https://doi.org/10.1080/10357718.2024.2398745>.
- Wong, Penny. 2025. "Rubio, Hegseth Meet with Australian Counterparts." Youtube. LiveNOW from FOX, December 8. <https://www.youtube.com/watch?v=rBCPpcF8qrM&t=631s>.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sixth edition. SAGE.
- Yu, Hong. 2024. *Understanding China's Belt and Road Initiative*. Vol. 26. Asia in Transition. Springer Nature Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-99-9633-9>.
- Zhang, Xuefei, and Zihan Wang. 2023. "Re-Orienting China-Australia Relations in the Theoretical Perspective of Security Dilemma." *SHS Web of Conferences* 169: 01056. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202316901056>.